

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL
PADA PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA**



SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan (D IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya**

OLEH:

KAREENA PRIANGKA PUTRI

062140512683

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL
PADA PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA**



SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan (D IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya**

OLEH:

KAREENA PRIANGKA PUTRI

062140512683

**POLITEKNIK NEGERI SRWIJAYA
PALEMBANG
2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telp (0711)353414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: Info@polsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kareena Priangka Putri
NPM : 062140512683
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / DIV Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana tersebut diatas beserta isinya merupakan hasil penulisan saya sendiri.
2. Skripsi tersebut bukan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari dinyatakan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain, maka saya bersedia menanggung konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2025
Yang Membuat Pernyataan



Kareena Priangka Putri
NPM 062140512683





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TNGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kareena Priangka Putri
NPM : 062140512683
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa

Telah diujikan pada Ujian Skripsi Tanggal 17 Juli 2025
Dihadapan Tim Penguji Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang, 2025

Menyetujui,
Pembimbing I

Choiruddin, S.E., M.Si
NIP. 197011052003121003

Pembimbing II

Okky Savira, S.E., M.Si, Ak
NIP. 199501042022032008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197104121998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 53414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI

Mahasiswa berikut:

Nama : Kareena Priangka Putri
NIM : 062140512683
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D-IV Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa

Telah melaksanakan revisi terhadap Skripsi yang diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Pelaksanaan revisi terhadap Skripsi tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi.

No	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	- Kesimpulan & Saran saling berhubungan - Point hasil penelitian buat presentase	Sulaiman, S.E., M.M NIP 196103231990031001	25-07-25	
2	- Teknik Penulisan	Rosy Armaini, S.E., M.Si, Ak., CA NIP 197108242006042001	31-07-25	
3	- Bab IV Berikan penekanan berdasarkan literatur dan basis hasil	Riana Mayasari, S.E., Ak., M.Acc NIP 199201312019032019	06/08/25	
4	- Pebaiki sesuai apa yang penguji instruksikan - Bab V hasil variabel dan pengaruhnya terhadap variabel dependen	Okky Savira, S.E., M.Si., Ak NIP 199501042022032008	22-08-25	

Palembang, 2025
Ketua Penguji

Sulaiman, S.E., M.M
NIP 196103231990031001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ALLAH SWT tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah 286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, anggan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra - Hindia)

“Sekecil apa pun kebaikan yang kita berikan, akan kembali meski bukan dari arah yang sama dengan tempat kita menaburnya.”

(Penulis)

Kupersembahkan untuk

- ❖ *Bapak (Alm) dan mama*
- ❖ *Kakak-kakakku*
- ❖ *Sahabat dan Teman-temanku*
- ❖ *Semua Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Politeknik*
- ❖ *Almamater yang ku banggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Jurusan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasan karena masih terbatasnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari Ibu/Bapak Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya serta semua pihak yang bersifat konstruktif untuk perbaikan skripsi ini agar lebih bermanfaat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Segala upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak yang turut berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan ide, masukan, dukungan moral, dan bantuan lainnya sejak awal hingga tersusunnya skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tuju kepada:

1. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
4. Ibu Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
5. Bapak Choiruddin, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, ilmu, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penyusunan Laporan Skripsi ini.

6. Ibu Okky Savira, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, ilmu, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penyusunan Laporan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang selama ini dengan keikhlasan hati memberikan ilmu dan pengetahuan.
8. Kepada cinta pertama penulis, Alm. Bapak Suwanto, seorang yang selalu penulis rindukan dan menjadi alasan penulis mampu bertahan sejauh ini. Kehadiranmu yang penuh kasih tetap hidup didalam hati dan menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai. Penulis berterima kasih atas semua kenangan, tawa dan kebersamaan, yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada mama tercinta, Ibu Nurmaznah, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tak ternilai, Meski tidak pernah merasakan bangku kuliah, mama selalu berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat menempuh Pendidikan hingga ke jenjang ini. Setiap tetes keringat dan kerja keras yang engkau curahkan menjadi nafkah penuh cinta yang tak akan pernah penulis lupakan. Sehat selalu dan panjang umur, karena mama harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.
10. Kakak penulis Sonia Priangka Putri A.Md dan suaminya Arya Yusdistira S.H, terima kasih banyak atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga membawa penulis sampai sejauh ini.
11. Keponakan penulis, Qalesya dan El, yang selalu ada dan menghibur penulis ketika penulis merasa lelah dan membutuhkan semangat baru.
12. Kepada seseorang yang kehadirannya tidak kalah penting dan selalu setia mendampingi penulis, Agung Setiawan, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih telah mengisi setiap bab dalam cerita ini, berkontribusi dalam penulisan skripsi, memberikan dukungan, hiburan, dan telinga yang selalu siap mendengar keluh kesah, serta menyaksikan setiap tetesan air mata hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman kelas seperjuangan Adinda, Olga, Indah, Gea dan Adel yang sudah berjuang Bersama selama empat tahun ini, terima kasih untuk semua dukungan, semangat, dan selalu memberikan bantuan.

14. Kepada teman-teman kelas 8 APN dan seluruh rekan Angkatan 2021 Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan saran, masukan serta semangat yang saling menguatkan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya atas segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses penyusunan proposal skripsi ini. Semoga proposal ini tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi bermanfaat dalam memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang positif bagi pihak yang membacanya.

Palembang, 2025

Kareena Priangka Putri
NPM. 062140512683

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa

Kareena Priangka Putri, 2025

Email: Kareenapriangkaputri@gmail.com

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa yang terdiri dari 16 Provinsi pada tahun 2019 sampai 2023. Teknik pengumpulan sampel yang ada pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat uji hipotesis data yang menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dengan versi 26, dengan metode analisis data yang menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

ABSTRACT

Factors Affecting Capital Expenditure in the Provinces of Sumatra and Java

Kareena Priangka Putri, 2025

Email: Kareenapriangkaputri@gmail.com

This study aims to determine the effect of regional revenue, special allocation funds, and budget surplus on capital expenditure in provinces located in Sumatra and Java, comprising 16 provinces during the period of 2019 to 2023. The sampling technique used in this research is saturation sampling. The study utilizes secondary data and hypothesis testing is conducted using the statistical Product and Service Solutions (SPSS) software versions 26, with the data analysis method employed being multiple linier regression. The partial hypothesis test results show that regional original revenue and budget surplus have a positive and significant effect on capital expenditure. In contrast, special allocation funds have a negative and significant effect on capital expenditure. Simultaneously, the results indicate that regional original revenue, special allocation funds, and budget surplus, collectively have a positive and significant influence on capital expenditure.

Keywords: *Regional Original Revenue, Special Allocation Funds, Budget Surplus, Capital Expenditure.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Toeri Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2 Belanja Modal	12
2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal.....	12
2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal	12
2.1.2.3 Peran Belanja Modal.....	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.4 Dana Alokasi Khusus	17

2.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	18
2.2	Penelitian Terdahulu	19
2.3	Kerangka Pemikiran	24
2.4	Hipotesis	25
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	25
2.4.2	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	26
2.4.3	Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.....	27
2.4.4	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.....	27
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3	Variabel Penelitian.....	28
3.3.1	Variabel Independen (X)	29
3.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	29
3.3.1.2	Dana Alokasi Khusus	29
3.3.1.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggran (SILPA)	30
3.3.2	Variabel Dependen	31
3.3.2.1	Belanja Modal.....	31
3.4	Populasi dan Sampel.....	33
3.4.1	Populasi	33
3.4.2	Sampel.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data	35
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	35
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	36
3.6.2.1	Uji Normalitas	36
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	36
3.6.2.3	Uji Autokorelasi.....	37
3.6.2.4	Uji Heteroskedastisitas	37
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
3.6.4	Uji Hipotesis.....	38
3.6.4.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	38

3.6.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual atau Parsial (Uji t).....	39
3.6.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian	40
4.1.2 Statistik Deskriptif.....	45
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.1.3.1 Uji Normalitas	47
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas.....	49
4.1.3.3 Uji Autokorelasi.....	50
4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas	51
4.1.4 Hasil Analisis Linier Berganda.....	52
4.1.5 Analisis Uji Hipotesis.....	54
4.1.5.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	54
4.1.5.2 Uji Statistik t (Uji Parsial)	54
4.1.5.3 Uji Statistik F (Uji Simultan).....	56
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	56
4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	59
4.2.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	61
4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Terhadap Belanja Modal.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 SILPA pada Provinsi di Sumatera dan Jawa.....	7
Tabel 2. 1 Ringkasan Peneliti Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 3.2 Daftar Populasi Peneliti	33
Tabel 3. 3 Daftar Provinsi di Sumatera dan Jawa yang dijadikan Sampel Peneliti	34
Tabel 3. 4 Kriteria Durbin-watson	37
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test sebelum transformasi menjadi LN.....	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test sesudah transformasi menjadi LN.....	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik t.....	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.....	3
Gambar 1. 2 Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa Tahun 2019-2023.....	4
Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa Tahun 2019-2023	5
Gambar 1. 4 Dana Alokasi Khusus pada Provinsi di Sumatera dan Jawa Tahun 2019-2023	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1 Data Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023	40
Gambar 4. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023	42
Gambar 4. 3 Data Dana Alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023	43
Gambar 4. 4 Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023	44
Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot of Regression standardize residual.....	47
Gambar 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 2 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 3 Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 4 Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 5 Tabulasi Data Sebelum LN Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa
- Lampiran 6 Tabulasi Data Sesudah LN Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa
- Lampiran 7 Hasil Output SPSS versi 26
- Lampiran 8 Tabel *Durbin-Watson* (DW)
- Lampiran 9 Tabel t
- Lampiran 10 Tabel f

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berlakunya otonomi daerah memberikan kemajuan perkembangan di setiap daerah Indonesia semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 6 Tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola sendiri pemerintah serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menggali lebih potensinya guna membiayai keperluan belanja daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 17, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

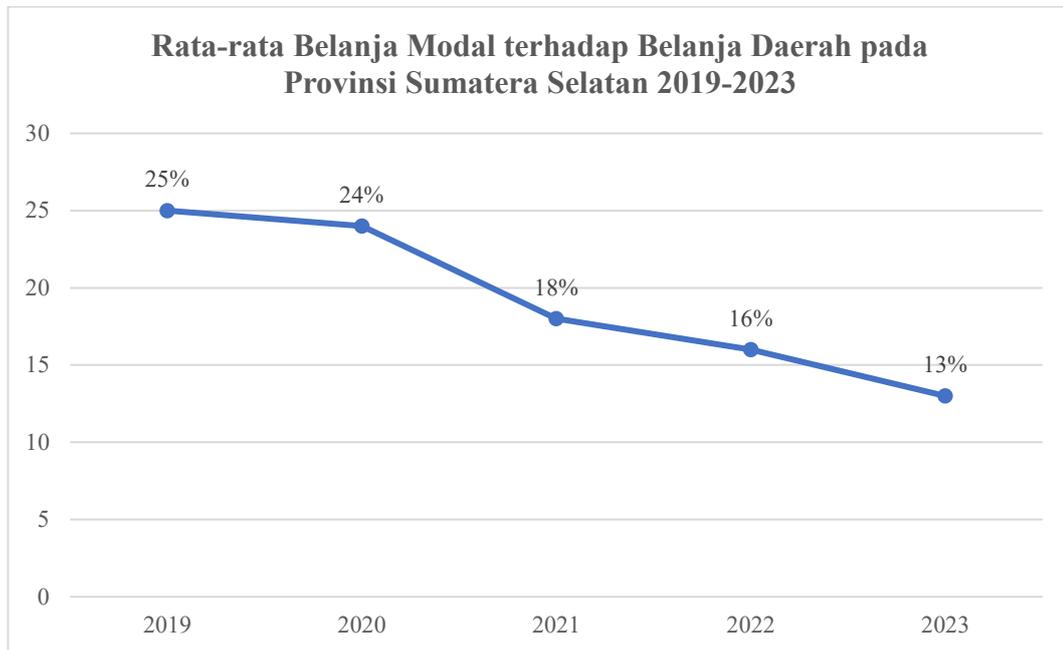
Permasalahan yang ada dalam pemerintah daerah adalah mengenai pengalokasian anggaran yang akan digunakan untuk program kegiatan, sumber daya yang terbatas, pemerintah perlu mampu mengatur pendapatan suatu daerah yang didapat untuk belanja-belanja daerah yang produktif. Belanja Daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum (Abbas et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 Ayat 1, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung pemerintah daerah dibagi menurut jenisnya yaitu (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; dan (3) belanja modal. Untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik yang akan meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah maka harus memperhatikan komposisi belanja daerah. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak akan cenderung naik, pajak tersebut merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah yang nantinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, salah satu komponen belanja yang harus diprioritaskan adalah alokasi belanja modal (Sudarsono & Praptoyo, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan pasal 1 ayat 17, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dua belas bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dapat dikategorikan belanja modal jika: Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual (Ratmono & Mahfud, 2017).

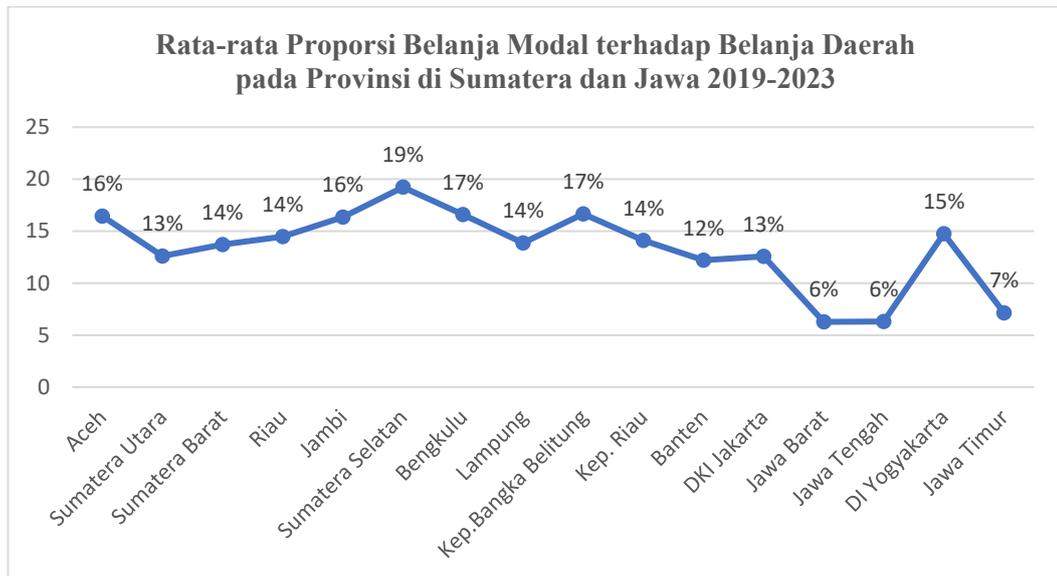
Berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja modal paling rendah 40% (empat puluh persen). Proporsi belanja tersebut menekankan bahwa daerah harus mengupayakan kegiatan yang memiliki manfaat jangka panjang. Namun, faktanya masih ada daerah yang masih perlu mencapai besaran target belanja modal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pemerintah pada Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1. 1
Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rata-rata proporsi belanja modal sebesar 25%, tahun 2020 sebesar 24%, tahun 2021 turun menjadi 18%, tahun 2022 turun menjadi 16%, pada tahun 2023 turun menjadi 13%. Berdasarkan grafik di atas, terlihat Proporsi belanja modal dari belanja daerah relatif kecil, persentasenya masih dibawah 40% yang seharusnya proporsi belanja modal tersebut paling rendah 40%. Permasalahan ini juga terdapat pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. Berikut merupakan rata-rata belanja modal pada provinsi di Sumatera dan Jawa selama 5 tahun.



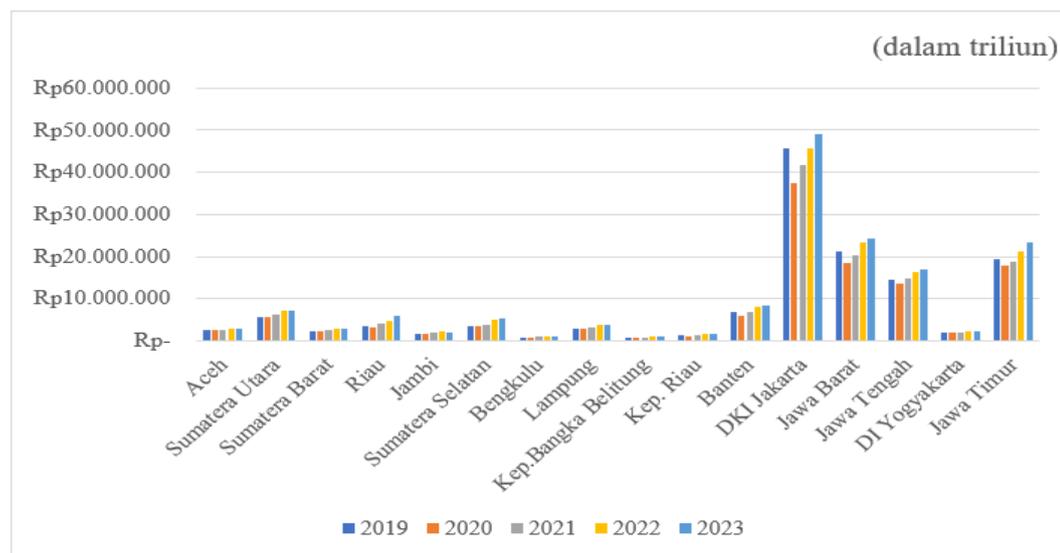
Gambar 1. 2
Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa Tahun 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa selama periode 2019-2023 masih rendah dan belum optimal, persentasenya masih dibawah 40%. Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah masih belum memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam hal ini, Belanja modal menjadi hal yang sangat penting karena infrastruktur serta sarana prasarana yang meningkat akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendanaannya sendiri berupa pendapatan asli daerah yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah dan digunakan sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut sehingga PAD juga mencerminkan kemandirian bagi suatu daerah dalam mengelola dan membiayai

kebutuhannya sendiri. Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, semakin berlimpah sumber daya yang dimiliki semakin tinggi kemungkinan pendapatan asli daerah yang dimiliki dan begitu juga sebaliknya.



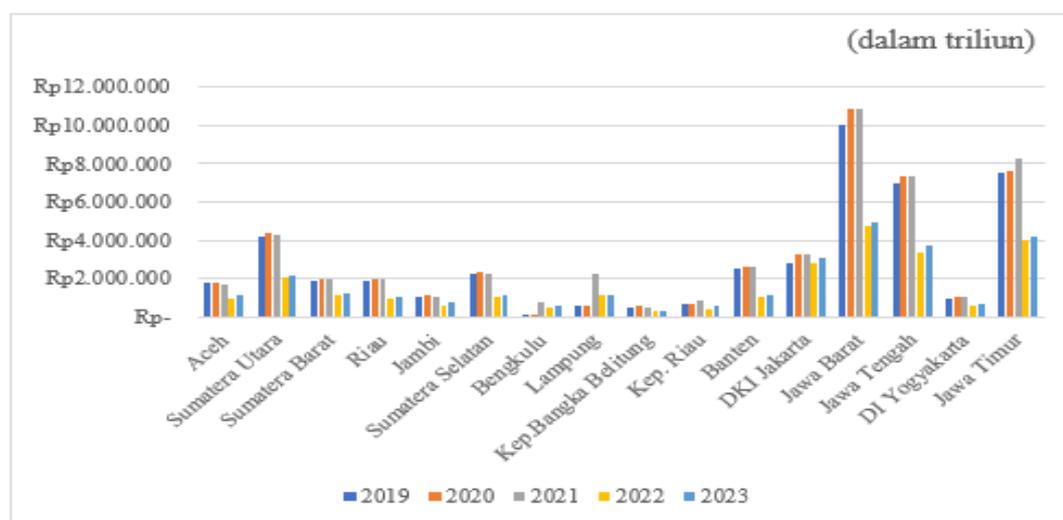
Gambar 1.3
Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa
Tahun 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data gambar 1.3 pada tahun 2019-2023, daerah yang memiliki PAD yang paling tinggi didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dengan jumlah diatas Rp 40.000.000.000.000 dan PAD terendah ditemukan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 683.432.674.809,81. Data PAD dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukan ketimpangan yang jelas antara setiap daerah.

Setiap daerah memiliki tingkat kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya yang akan menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan untuk mendukung otonomi daerah. Pemberian Dana Perimbangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu jenis Dana perimbangan adalah Dana alokasi khusus (DAK). Menurut (Wisnuwardana & Kurnia, 2023), Dana alokasi khusus adalah Dana yang berasal dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu guna mendukung kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan memiliki prioritas nasional. Dana tersebut digunakan khususnya untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dasar yang belum memenuhi standar yang ditentukan, serta untuk mempercepat pembangunan daerah.



Gambar 1. 4
Dana Alokasi Khusus pada Provinsi di Sumatera dan Jawa
Tahun 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 3.4 dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan alokasi antar provinsi. Provinsi dengan DAK tertinggi terdapat pada provinsi Jawa Barat yang konsisten menerima DAK terbesar selama periode 2019-2023. Sebaliknya, DAK terendah ada pada provinsi Bengkulu pada tahun 2020.

Pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan selain PAD dan Transfer dari pusat, pemerintah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA adalah selisih lebih/kurang dari realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (B. Siregar, 2017). Sebagian besar SILPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung

berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang didalamnya juga belanja tidak langsung. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SILPA dijadikan indikator efisiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari pada komponen pengeluaran pembiayaan (Afkarina & Hermanto, 2017).

Tabel 1. 1
SILPA pada Provinsi di Sumatera dan Jawa
(dalam triliun)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	2.954.457	2.846.141	3.969.617	3.933.680	1.304.678
Sumatera Utara	981.167	336.597	499.350	1.097.493	1.076.160
Sumatera Barat	501.905	328.391	260.850	483.680	289.279
Riau	68.262	81.216	531.683	983.967	575.258
Jambi	671.280	420.323	390.555	727.979	631.461
Sumatera Selatan	680.516	349.152	121.619	79.720	322.917
Bengkulu	213.318	29.072	102.542	273.989	201.348
Lampung	93.876	336.132	190.917	383.279	292.676
Kep.Bangka Belitung	302.270	220.399	49.536	443.619	959.301
Kep. Riau	119.762	405.366	64.513	170.514	388.950
Banten	1.079.956	957.241	681.415	570.105	468.942
DKI Jakarta	9.755.082	1.203.971	5.165.696	9.721.718	8.600.096
Jawa Barat	3.060.689	3.289.300	1.195.765	2.575.016	2.335.392
Jawa Tengah	1.612.602	1.119.157	861.343	1.435.692	1.236.469
DI Yogyakarta	471.794	420.567	484.453	554.487	462.271
Jawa Timur	4.565.392	4.369.342	3.700.033	4.079.381	4.446.324

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa SILPA pada Provinsi di Sumatera dan Jawa memiliki jumlah yang cukup besar, sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi belanja modal yang bisa digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap. Dengan memanfaatkan SILPA secara efisien dan efektif, pemerintah daerah dapat berkontribusi pada peningkatan investasi dalam pembangunan fisik dan infrastruktur di wilayahnya. Oleh karena itu pengelolaan SILPA dengan baik menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan (Nasution et al., 2022) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, (Maula et al., 2023) yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat, dan (Syukri et al., 2022) yang dilakukan di Provinsi Jambi. Hasil dari (Nasution et al., 2022) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari (Maula et al., 2023) mengenai *Factors Affecting Capital Expenditure In Districts in West Java Province* menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif, sedangkan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal. Hasil dari (Syukri et al., 2022) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dengan hasil temuan yang berbeda-beda pada setiap variabel dan uraian latar belakang permasalahan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. Penulisan ini diberi judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa pada tahun 2019-2023?

2. Apakah Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa pada tahun 2019-2023?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa pada tahun 2019-2023?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa pada tahun 2019-2023?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini selaras dengan yang diteliti dan ruang lingkup yang jelas, penelitian diberikan batasan sebagai masalah pada:

1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari <https://e-ppid.bpk.go.id> yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited*.
2. Penelitian ini dilakukan pada 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa menggunakan tahun 2019 sampai 2023.
3. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2019-2023.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang, sehubungan dengan belanja modal pada pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa.
2. Bagi Peneliti
Sebagai referensi dan acuan untuk memahami pengetahuan mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.
3. Bagi Pembaca
Untuk menambah wawasan lebih dan menjadi bahan kajian dalam menambah ilmu mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebagai kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen). Prinsipal bertanggung jawab dalam membuat kontrak, mengawasi, serta mengarahkan pelaksanaan kontrak, sementara agen berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan keinginan prinsipal.

Dalam penelitian ini, teori keagenan tercermin dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, yang berperan sebagai agen untuk mengelola urusan pemerintahan termasuk dibidang keuangan daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan fiskal kepada daerah melalui Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN, guna untuk membantu daerah dalam menjalankan fungsinya dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Teori keagenan juga dapat dilihat dalam hubungan antara masyarakat sebagai pihak prinsipal yang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, retribusi, dan kontribusi lainnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, sebagai agen pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pendapatan tersebut sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas layanan publik dan sarana umum bagi masyarakat. Selain itu teori keagenan dapat dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh dari selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode, dimana pemerintah pusat dan masyarakat sebagai pihak prinsipal yang memberikan kepercayaan pada pemerintah daerah sebagai pihak agen untuk mengelola dana tersebut.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan pasal 1 ayat 17 menyatakan Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ayat 37, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap atau kekayaan daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah, untuk memperoleh atau menambah aset dan yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi karena termasuk dalam perencanaan keuangan jangka panjang maka belanja ini berfokus pada pembiayaan dan pengadaan aset tetap yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi dimasa depan. Untuk itu belanja modal meningkatkan aset tetap pemerintah, sehingga diperlukan perhatian yang matang dalam pelaksanaan belanja modal. Belanja modal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah agar setiap aset tetap yang bertambah dari belanja modal tidak terbuang dengan percuma atau nanti bisa menjadi penambahan beban keuangan pada pemerintah daerah karena dengan bertambahnya suatu aset daerah maka akan meningkatkan biaya pemeliharaan daerah itu sendiri.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis Belanja modal dapat dikategorikan menjadi enam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran yaitu:

1. Belanja Modal untuk Tanah
adalah seluruh biaya yang yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan / penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran

lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin
adalah biaya-biaya yang digunakan untuk penambahan peralatan dan mesin yang digunakan dalam menjalankan kegiatan, termasuk biaya pembelian, biaya pemasangan, biaya transportasi, dan biaya-biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan memasok hingga peralatan mesin dapat digunakan.
3. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan
adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan Gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya konstruksi, pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.
4. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan
adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai / digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan
5. Belanja Modal Lainnya
adalah biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, dan jaringan. Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli pengadaan barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, buku-buku jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan yang tidak dijual kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi
6. Belanja Modal BLU
adalah pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian AT dan/atau aset lainnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasi BLU.

2.1.2.3 Peran Belanja Modal

Menurut (Maghfiroh et al., 2024) Belanja Modal mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan, pemeliharaan, dan peningkatan aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari satu periode akuntansi. Contoh aset tetap tersebut meliputi perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah hasil belanja modal merupakan prasyarat utama terpenuhinya pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk dapat menambahkan aset tetap, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana berupa anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan

pada kebutuhan masing-masing daerah terhadap sarana dan prasarana bagi kelangsungan penyelenggara fasilitas umum pemerintah. Pada umumnya pembelian setiap tahunnya biasanya dilakukan dengan pembayaran daerah berdasarkan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang akan berdampak finansial dalam jangka panjang. Secara teoritis, cara memperoleh aset tetap ada tiga, yaitu dengan membangunnya sendiri, Membelinya dan menukarkannya dengan aset tetap lainnya. Biasanya yang paling umum yang dilakukan oleh pemerintah adalah cara membeli.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 20 adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan peraturan perundang-undang. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (B. Siregar, 2017). Dari dua pendapat diatas mengenai pengertian pendapatan asli daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah dan digunakan sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut sehingga Pendapatan asli daerah juga mencerminkan kemandirian bagi suatu daerah dalam mengelola dan membiayai kebutuhannya sendiri.

Tujuan pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan layanan publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Farhan et al., 2023). Pendapatan daerah dijadikan sebagai modal awal bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha pada suatu daerah sehingga meminimalkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam pendanaan. Setiap daerah akan diberikan kewenangan dan tanggung

jawab masing-masing yang sesuai, sehingga daerah tersebut dapat memanfaatkan potensi dari hasil pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan bagian penting karena suatu daerah dapat dikatakan mandiri dilihat dari keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 20 ada empat jenis yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada suatu daerah yang tidak ada imbalan langsung. Pajak daerah merupakan iuran dari pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak ini bisa digunakan untuk membiayai berfungsinya pemerintah daerah. Menurut (B. Siregar, 2017), klasifikasi pendapatan asli daerah ada 2 (dua) kategori yaitu, jenis pajak daerah provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota.

1) Pajak jenis daerah berdasarkan provinsi mencakup:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2) Pajak jenis pajak kabupaten/kota mencakup:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerang Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan
- k. Bea Penerimaan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran pelayanan perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan suatu badan atau perseorangan.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 87, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

- a. Pelayanan kesehatan

- b. Pelayanan kebersihan
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - d. Pelayanan pasar
 - e. Pengendalian lalu lintas
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
 - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
 - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Persetujuan bangunan Gedung
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing
 - c. Pengelolaan pertambangan rakyat
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan objek pajaknya, jenis pendapatan mencakup:
- a. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain:
- a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Hasil kerja sama daerah
 - c. Jasa giro
 - d. Hasil pengelolaan dana bergulir
 - e. Pendapatan bunga
 - f. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah
 - g. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

- h. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- i. Pendapatan denda pajak daerah
- j. Pendapatan denda retribusi daerah
- k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- l. Pendapatan dari BLUD
- m. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 1, Dana alokasi khusus adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut (Wisnuwardana & Kurnia, 2023), Dana alokasi khusus adalah Dana yang berasal dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu guna mendukung kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan memiliki prioritas nasional. Dana tersebut digunakan khususnya untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dasar yang belum memenuhi standar yang ditentukan, serta untuk mempercepat pembangunan daerah.

Menurut (Rasu et al., 2019), Dana Alokasi Khusus Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan Jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 54, Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pengalokasian dana alokasi khusus
 - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus.
2. Dua tahap perhitungan dana alokasi khusus:
 - a. Pertama, penentuan daerah tertentu yang akan menerima dana alokasi khusus
 - b. Kedua, penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.
3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Berdasarkan alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
5. Alokasi dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri teknis Menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus.

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Dalam (B. Siregar, 2017), SILPA adalah selisih lebih/kurang dari realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode. Pelaporan SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SILPA menjadi salah satu indikator dalam menilai pemerintah dalam mengelola keuangan. Ketika terjadi surplus anggaran, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengatur pendapatan dan belanja secara efektif, sehingga dapat mengurangi utang atau mengalokasikan dana untuk investasi yang mendukung

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika terjadi defisit anggaran dapat menjadi tanda bahwa pemerintah mengalami kendala dalam menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dan pengeluaran yang bisa mempengaruhi kestabilan keuangan.

Besarnya SILPA tergantung pada tingkat belanja dan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jika pendapatan daerah melebihi jumlah belanja, maka akan terjadi surplus anggaran yang berpotensi menghasilkan SILPA dalam jumlah besar. Sebaliknya, jika belanja lebih tinggi dari pendapatan, maka kemungkinan SILPA yang diperoleh akan kecil atau bahkan tidak ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Ringkasan Peneliti Terdahulu

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Sarda Devi Budi Utami dan Ikhsan Budi Riharjo (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) d. Belanja Modal (Y)	a. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
2	Meta Nisa Arthadela dan Titik Mildawati, (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) d. Belanja Modal (Y)	a. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak

				Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
3	Farhan Kresna Pramudya dan M Faisal Abdullah, (2021)	Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Dana Alokasi Khusus (X3) d. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
4	Engrith Grafelia Leunupun dan Piter Heumasse, (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Khusus (X2) c. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
5	Indra Gunawan Siregar, (2022)	Pengaruh Dau, Dak, Pad Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (X1) b. Dana Alokasi Khusus (X2) c. Pendapatan Asli Daerah (X3) d. Pertumbuhan Ekonomi (X4) e. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal d. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

6	Safriyeni dan Hidayat, (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Dana Alokasi Khusus (X3) d. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal d. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal e. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
7	Raniah, Usep Siswadi, dan Ana Ima Sofana, (2024)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (X2) b. Dana Alokasi Khusus (X3) c. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
8	Santi Melati Silalahi, Elisabeth Saida Silaban dan Ira Meilani Sipatuhar, (2025)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X2) c. Dana Alokasi Umum (X3) d. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
9	Pika, Saiful, dan Nila Aprila, (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X2) c. Pinjaman Daerah (X3) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh

		Modal Sumatera Selatan	d. Belanja Modal (Y)	Terhadap Belanja Modal c. Pinjaman Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
10	Al Habib Ahmad Nasution, Kiagus Zainal Arifin, dan Choiruddin (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Khusus (X2) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) d. Belanja Modal (Y)	a. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
11	Kholida Atiyatul Maulana, Kartika Nur Alfiyyah, Isro Iyatul Mubarakah, Wiwiek Rabiatul Adawiyah, dan Christina Tri Setyorini (2023)	<i>Factors Affecting Capital Expenditure In Districts In West Java Province</i>	a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Dana Alokasi Khusus (X3) d. Dana Bagi Hasil (X4) e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X5) f. Belanja Modal (Y)	a. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal c. Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal d. Dana Bagi Hasil Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

12	Fildzah Asry Sajidah, Henny Yulsiati, dan Yeve Dwitayanti, (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Perimbangan (X2) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) d. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
13	Noprizal Dharmawan, Indra Cahya Kusuma, dan Mas Nur Mukmin, (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota Bogor, Bekasi Dan Depok)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Dana Alokasi Khusus (X3) d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) e. Belanja Modal (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal c. Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
14	Dimas Arif Prasetyo dan Dedi Rusdi (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (X1) b. Dana Alokasi Khusus (X2) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) d. Pendapatan Asli Daerah (X4) e. Dana Bagi Hasil (X5) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Negatif Terhadap Belanja Modal c. Sisa Lebih Pembiayaan Ber-

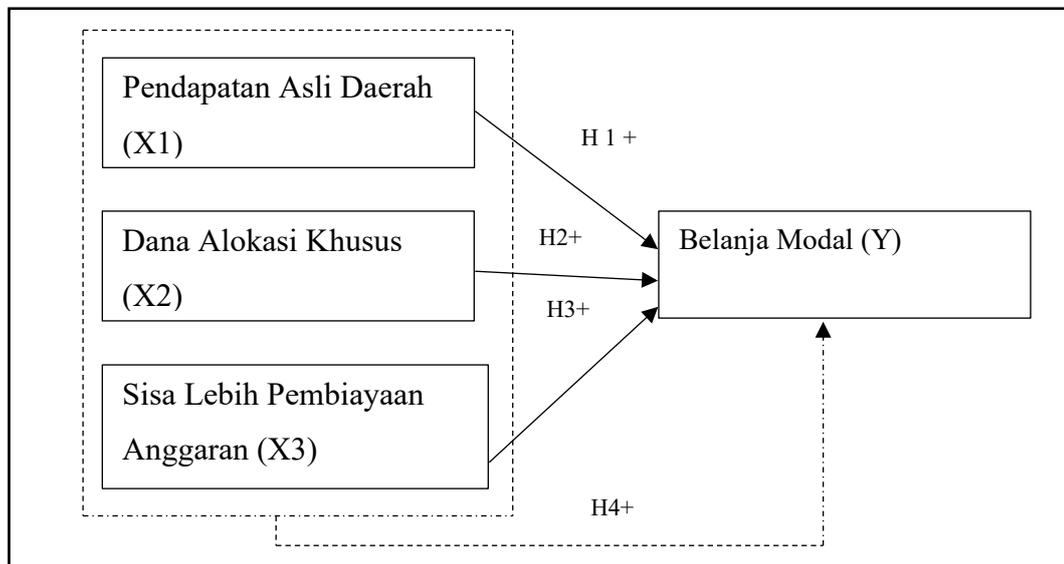
			f. Belanja Modal (Y)	Pengaruh Negatif Terhadap Belanja Modal d. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal e. Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal
15	Riyan Hermawan, dan Emi Masyitah (2024) (Febriyanti & Dewi, 2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara	a. Pendapatan Asli Daerah (X1) b. Dana Alokasi Umum (X2) c. Dana Bagi Hasil (X3) d. Belanja Modal (Y)	a. Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal c. Dana Bagi Hasil Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal

Sumber: Peneliti terdahulu, Tahun 2021 s.d 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat ditujukan menjadi konsep untuk menjelaskan dan menguraikan keterkaitan hubungan antara suatu variabel yang diteliti mengikuti batasan-batasan dan rumusan masalah yang ada. Menurut (Sugiyono, 2022), bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana faktor yang telah diidentifikasi dengan permasalahan yang penting. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal, adapun variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagai variabel independen. sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Modal.

Kerangka berpikir pada peneliti ini bisa dilihat pada model gambar sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2025

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—→ : Secara parsial

- - → : Secara simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu peristiwa yang belum dapat dibuktikan kebenarannya yang akan dibuktikan oleh peneliti berdasarkan teori dan dirumuskan peneliti setelah dipahami oleh peneliti (Fauzi et al., 2022). Hipotesis penelitian menjadi jawaban yang bersifat sementara karena jawaban yang ada belum berdasarkan pada kebenaran yang diselidiki melalui pengumpulan data.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Agency theory menggambarkan hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, pada pendapatan asli daerah yang dapat dilihat melalui peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang bisa diwujudkan melalui alokasi belanja modal setiap tahun untuk pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Susanti & Fahlevi, 2016).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam membiayai kebutuhan belanja daerah serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat serta menarik minat investor untuk menanamkan modal yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Badjra et al., 2017) menunjukkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyatakan hipotesis pada peneliti ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut (Wisnuwardana & Kurnia, 2023), Dana alokasi khusus adalah Dana yang berasal dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu guna mendukung kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan memiliki prioritas nasional. Dana tersebut digunakan khususnya untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dasar yang belum memenuhi standar yang ditentukan, serta untuk mempercepat pembangunan daerah. Tujuan utama dari dana alokasi khusus adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah itu sendiri. Jadi semakin besar Dana Aloaksi Khusus yang diperoleh suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ananda & Habiburrahman, 2023) menunjukkan hasil Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyatakan hipotesis pada peneliti ini adalah:

H2: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Menurut (Siregar, 2017), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta antara penerima dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode anggaran. SILPA dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk belanja modal untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan SILPA sering dijadikan sebagai indikator efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena terbentuknya SILPA menunjukkan adanya surplus dalam APBD dan kondisi pembiayaan neto yang positif yaitu Ketika penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya (Afkarina & Hermanto, 2017). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pika et al., 2021) menunjukkan hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyatakan hipotesis pada peneliti ini adalah:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Belanja terhadap Belanja Modal.

2.4.4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian fiskal daerah, di mana semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar kemampuan daerah membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada pusat. Dana Alokasi Khusus dari APBN membantu pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal, serta mendorong belanja produktif seperti belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menunjukkan efisiensi anggaran dan dapat dimanfaatkan kembali untuk belanja modal di periode berikutnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arifah & Haryanto, 2019) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian (Ananda & Habiburrahman, 2023) menunjukkan hasil Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format alternatif sebagai berikut:

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022:2) mengemukakan bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis penelitian menurut (Sugiyono, 2022:8) sebagai berikut:

1. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Peneliti ini dalam peneliti kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2022:137), sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 16 (enam belas) Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun pengamatan 2019 sampai tahun 2023. Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019-2023 melalui website <https://e-ppid.bpk.go.id>. Waktu penelitian ini dimulai dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2025.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:39). Variabel dalam penelitian ini ada tiga variabel independen yaitu: Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta satu variabel dependen yaitu Belanja Modal.

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2022:39). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), dan SILPA (X3).

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang tidak sah dengan peraturan perundang undang. PAD dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang sudah diudit. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibentuk formula sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

3.3.1.2 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 1, Dana alokasi khusus adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang sudah diaudit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 54, Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan daerah tertentu menerima DAK

Menentukan daerah penerima dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.

- 1) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

$$\text{Kriteria Umum} = (\text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai PNSD})$$

Keterangan:

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan umum APBD (Pendapatan asli daerah + Dana alokasi umum + Dana bagi hasil - dana bagi hasil dana reboisasi)

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

- 2) Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan alokasi DAK khusus yang digunakan yaitu:
 - a) Memperhatikan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, yang meliputi: daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah istimewa.
 - b) Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokas DAK.
- 3) Kriteria Teknis, ditetapkan oleh kementerian/Lembaga teknis terkait indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis.

- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Menghitung DAK per daerah dengan menggunakan indeks dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

3.3.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA adalah selisih lebih/kurang dari realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (B. Siregar, 2017). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah

pada Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang sudah diaudit. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibentuk formula sebagai berikut.

$$\text{Sisa Lebih Perhitungan anggaran} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan Belanja Modal sebagai variabel dependen (Y).

3.3.2.1 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa, Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya, dan belanja BLU. Belanja modal dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah pada Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang sudah diaudit dirumuskan dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya,} + \text{Belanja BLU}$$

Berikut ringkasan operasional variabel penelitian yang disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan lain-lain pendapatan asli daerah	PAD = Pajak Daerah +Retribusi Daerah +Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rasio

	yang sah dengan peraturan perundang undang. (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022).	yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana alokasi khusus adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP Nomor 55 Tahun 2005)	Dana Alokasi Khusus = (Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai PNSD)	Rasio
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang dari realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (B. Siregar, 2017).	Sisa Lebih Perhitungan anggaran = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto	Rasio
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode. (PMK Nomor 62 Tahun 2023).	Belanja Modal = Belanja Tanah +Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan +Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset	Rasio

		Lainnya + Belanja BLU	
--	--	--------------------------	--

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2022:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Sumatera dan Jawa, terdiri dari 16 Provinsi selama 5 Tahun yaitu tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Daftar Populasi Peneliti

No	Nama Provinsi
1.	Aceh
2.	Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat
4.	Riau
5.	Jambi
6.	Sumatera Selatan
7.	Bengkulu
8.	Lampung
9.	Kep.Bangka Belitung
10.	Kep.Riau
11.	Banten
12.	DKI Jakarta
13.	Jawa Barat
14.	Jawa Tengah
15.	DI Yogyakarta
16.	Jawa Timur

Sumber: BPK-RI, (data diolah, 2025)

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2022:181), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan sampling jenuh yang artinya seluruh bagian dari populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa. Daftar nama pada Provinsi di Sumatera dan Jawa yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3
Daftar Provinsi di Sumatera dan Jawa yang dijadikan Sampel Peneliti

No	Nama Provinsi
1.	Aceh
2.	Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat
4.	Riau
5.	Jambi
6.	Sumatera Selatan
7.	Bengkulu
8.	Lampung
9.	Kep.Bangka Belitung
10.	Kep.Riau
11.	Banten
12.	DKI Jakarta
13.	Jawa Barat
14.	Jawa Tengah
15.	DI Yogyakarta
16.	Jawa Timur

Sumber: BPK-RI, (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 3.3 diatas sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2019 sampai 2023. Total sampel dalam penelitian ini 80 sampel yang diperoleh dari 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa selama 5 tahun yaitu tahun 2019 sampai 2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2022:224), Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara peneliti merangkum data yang akan digunakan dalam penelitian dan kemudian memutuskan metode mana yang nantinya digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Data yang digunakan berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lain. Kegiatan pada analisis data meliputi pengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data pada tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menentukan hingga menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2022:147).

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji f dan uji t. Alat yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah SPSS 26.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022:147).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Untuk memeriksa apakah terdapat penyimpangan pada data maka dilakukan uji asumsi klasik. Sebelum menjalankan pengujian regresi linier berganda, terlebih dahulu harus dilakukan langkah-langkah yaitu asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut (Ghozali, 2021:196), tujuan uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan analisis statistik. Pada analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P *Plots*. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data berdistribusi normal, maka data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.
2. Jika data tidak berdistribusi normal, maka data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya.

Uji normalitas menggunakan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal. Maka dari itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf 0,05. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Data residual berdistribusi normal, jika nilai signifikansi $> 0,05$.
2. Data residual tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikansi $< 0,05$.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas menurut (Ghozali, 2021:157) bertujuan menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Deteksi Multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari

nilai tolerance dan nilai VIF (*variance inflation factor*). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka bisa diindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , maka bisa diindikasikan bahwa terjadi multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menurut (Ghozali, 2021:162) bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi dan model regresi dapat dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena residual (kesalahan pengganggu) dan sering terjadi pada sampel data dengan time series dengan n – sampel pada periode tertentu. Penguji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan *Uji Durbin Watson (DW Test)* yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. *Uji Durbin Watson (DW Test)* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independent

Tabel 3. 4
Kriteria Durbin-watson

Hipotesis nol	Keputusan	jika
Tidak ada autokorelasi positif	Total	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2021

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2021:178) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik ini digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal
 X1 : Pendapatan Asli Daerah
 X2 : Dana Alokasi Khusus
 X3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
 ε : Variabel pengganggu

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2021:147) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual atau Parsial (Uji t)

Menurut uji statistik t dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara menentukan hasil uji f dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Berdasarkan Berdasarkan nilai signifikansi: Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima atau berpengaruh dan jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh.
2. Berdasarkan nilai perbandingan t hitung dan t tabel: Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis (H_0) diterima dan (H_1) ditolak atau tidak berpengaruh, dan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan (H_1) diterima atau berpengaruh.

3.6.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2021:148) uji simultan atau uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

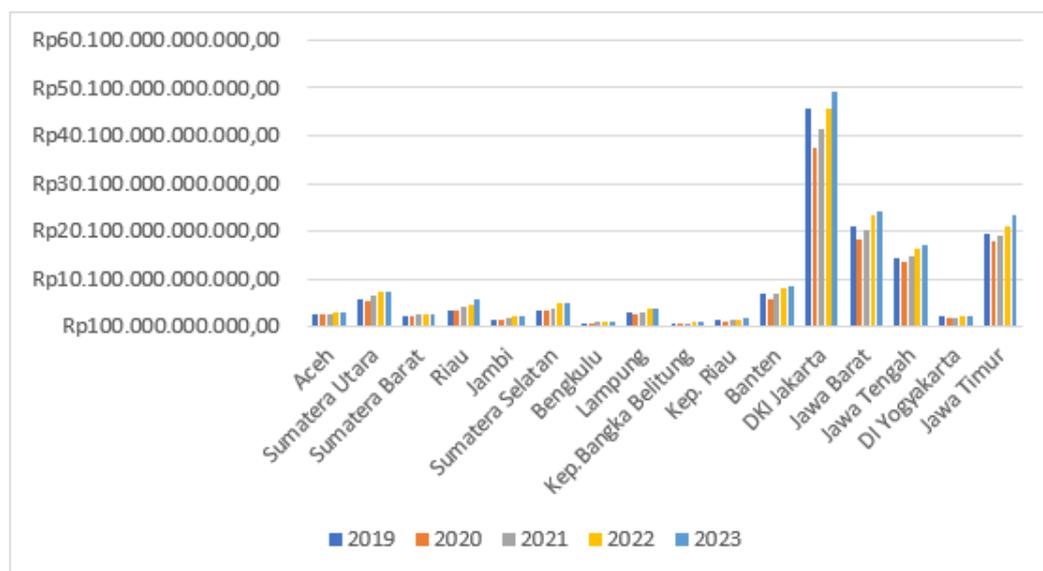
1. Berdasarkan nilai signifikansi: Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima atau berpengaruh dan jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh.
2. Berdasarkan nilai perbandingan f hitung dan f tabel: Jika nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka hipotesis (H_0) diterima dan (H_1) ditolak atau berpengaruh, dan jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan (H_1) diterima atau berpengaruh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas data yang diperoleh dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia <https://e-ppid.bpk.go.id> data yang diolah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi di Sumatera dan Jawa tahun anggaran 2019-2023. Pada bab ini akan dibahas hasil analisis sehubungan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai variabel independent, serta belanja modal sebagai variabel dependen. Dalam menganalisis data penulis menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel* dan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Gambar 4.1 dibawah ini merupakan pengolahan data belanja modal sebanyak 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa dalam waktu 5 tahun, maka sampel yang digunakan sebanyak 80.



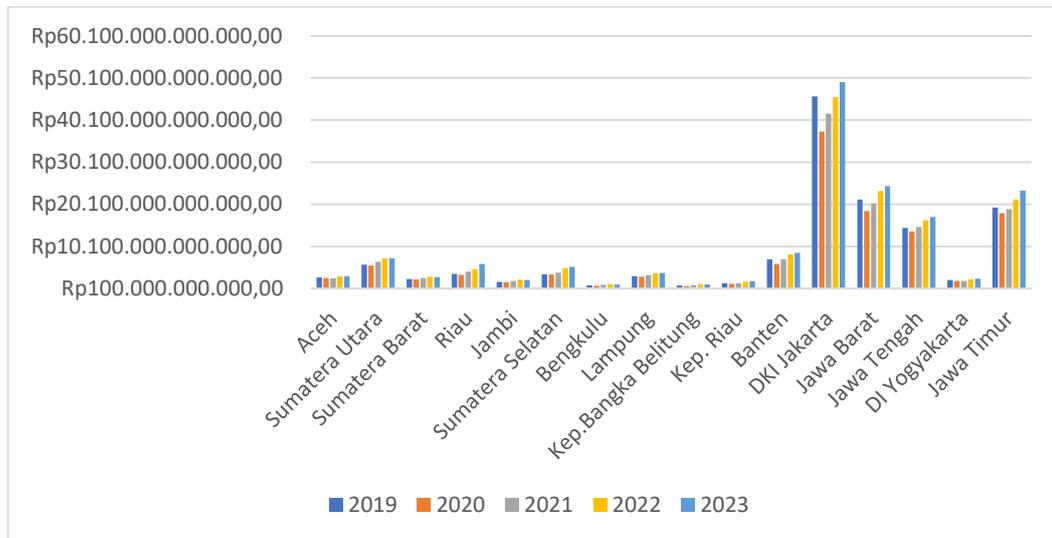
Gambar 4. 1

Data Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023

Sumber: e-ppid.bpk.go.id (data diolah peneliti, 2025)

Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tahun 2019 daerah yang memiliki belanja modal tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 11.551.927.779.590,00 dan belanja modal terendah Kep. Bangka Belitung sebesar 441.201.203.550,86. Pada tahun 2020 belanja modal tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.173.223.520.882,00 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 417.095.645.164,70. Pada tahun 2021 belanja modal tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 6.865.827.016.719,00 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 324.342.084.410,29. Pada tahun 2022 belanja modal tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 8.808.194.842.704,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 354.008.245.838,87. Pada tahun 2023 belanja modal tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 8.857.260.068.298,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 586.890.214.822,25.

Berdasarkan data per tahun dari 2019 hingga 2023, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menjadi daerah dengan alokasi belanja modal tertinggi, sementara provinsi terendah berbeda-beda tiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan, alokasi belanja modal tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar Rp 11.551.927.779.590,00, dan belanja modal terendah adalah Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 sebesar Rp 324.342.084.410,29. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal mencerminkan besarnya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah. Dalam melaksanakan belanja modal, pemerintah provinsi membutuhkan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut ini merupakan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran Provinsi di Sumatera dan Jawa.



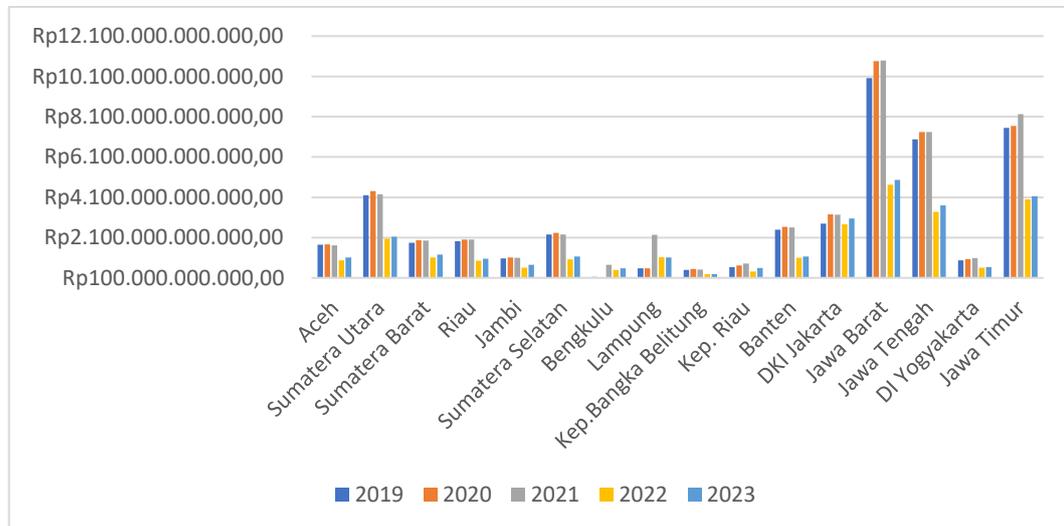
Gambar 4. 2
Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa
2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tahun 2019 daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 45.707.400.004.802,00 dan pendapatan asli daerah terendah Provinsi Bengkulu sebesar 826.674.936.049,87. Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 37.414.74.711.193,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 683.432.674.809,81. Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar RP 41.606.307.405.630,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 895.763.128.991,25. Pada tahun 2022 pendapatan asli daerah tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar RP 45.608.404.729.501,00 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 1.088.415.649.978,20. Pada tahun 2023 pendapatan asli daerah tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar RP 49.139.745.715.234,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 1.012.603.272.005,71.

Berdasarkan data per tahun dari 2019 hingga 2023, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menjadi daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi, sementara provinsi dengan pendapatan terendah berbeda - beda setiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan, alokasi pendapatan asli daerah tertinggi di miliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar Rp

49.139.745.715.234,00 dan pendapatan terendah dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar Rp 683.432.674.809,81.



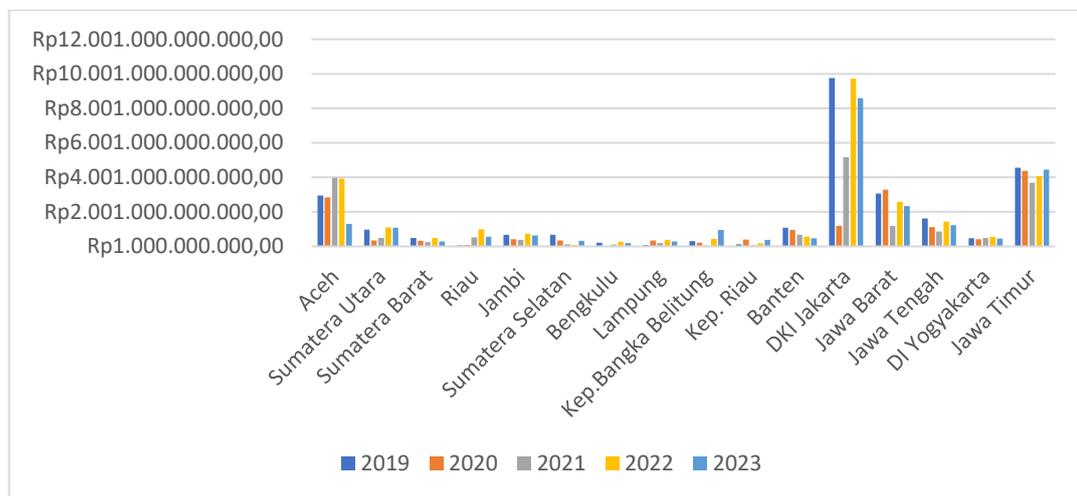
Gambar 4.3
Data Dana Alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tahun 2019 daerah yang memiliki dana alokasi khusus tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 10.018.939.410.784,00 dan terendah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 148.677.988.196,00. Pada tahun 2020 dana alokasi khusus tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 10.853.697.316.005,00 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 136.449.090.558,00. Pada tahun 2021 dana alokasi khusus tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 10.886.719.042.47,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 516.892.969.333,00. Pada tahun 2022 dana alokasi khusus tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.731.465.673.851,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 295.421.758.466,00. Pada tahun 2023 dana alokasi khusus tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.957.076.641.184,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 297.015.071.443,00.

Berdasarkan data per tahun dari 2019 hingga 2023, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat secara konsisten menjadi daerah dengan dana alokasi khusus tertinggi, sementara provinsi dengan dana alokasi khusus terendah berbeda - beda setiap

tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan dana alokasi khusus tertinggi di miliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar Rp 10.886.719.042.417,00 dan dana alokasi khusus terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar Rp 136.449.090.558,00.



Gambar 4. 4
Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah (SILPA) Provinsi Sumatera dan Jawa 2019-2023

Sumber: *e-ppid.bpk.go.id* (data diolah peneliti, 2025)

Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa tahun 2019 daerah yang memiliki SILPA tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 9.755.082.722.776,00 dan terendah Provinsi Riau sebesar Rp 68.262.856.091,20. Pada tahun 2020 SILPA tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 4.369.342.489.882,39 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 29.072.636.817,45. Pada tahun 2021 SILPA tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 5.165.696.290.359,00 dan terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 49.536.738.602,62. Pada tahun 2022 SILPA tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 9.721.718.831.341,00 dan terendah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 79.720.535.110,59. Pada tahun 2023 SILPA tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 8.600.096.664.254,00 dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 201.348.447.490,68.

Berdasarkan data per tahun dari 2019 hingga 2023, terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menjadi daerah dengan SILPA tertinggi, sementara provinsi dengan SILPA terendah berbeda - beda setiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan, sisa lebih pembiayaan anggaran tertinggi di miliki oleh Provinsi DKI

pada tahun 2019 sebesar Rp 9.755.082.722.776,00 Jakarta dan dana alokasi khusus terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar Rp 29.072.636.817,45.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran atau deskripsi dari suatu data yang telah terkumpul dan dapat dilihat dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standar deviation*. Nilai ini bermanfaat memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti sehingga dapat menjelaskan karakteristik data yang ada dengan menjelaskan besaran nilai tersebut. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum, nilai tertinggi ditunjukkan oleh skor maksimum, mean digunakan untuk mengukur rata-rata dari data dan standar deviasi digunakan untuk menentukan sampel seberapa dekat sampel dengan nilai rata-rata penelitian.

Analisis statistik deskriptif menyajikan gambaran masing-masing variabel independen dan dependen. Variabel independent terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, sedangkan variabel dependen adalah belanja modal. Berdasarkan data yang ada, diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	80	27.25	31.53	29.1248	1.13719
Dana Alokasi Khusus	80	25.64	30.02	28.0944	.96984
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	80	24.09	29.91	27.1918	1.28718
Belanja Modal	80	26.51	30.08	27.8475	.73951
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Tabel 4.1 memberikan penjelasan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian pada laporan realisasi anggaran pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. Berikut adalah rincian statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

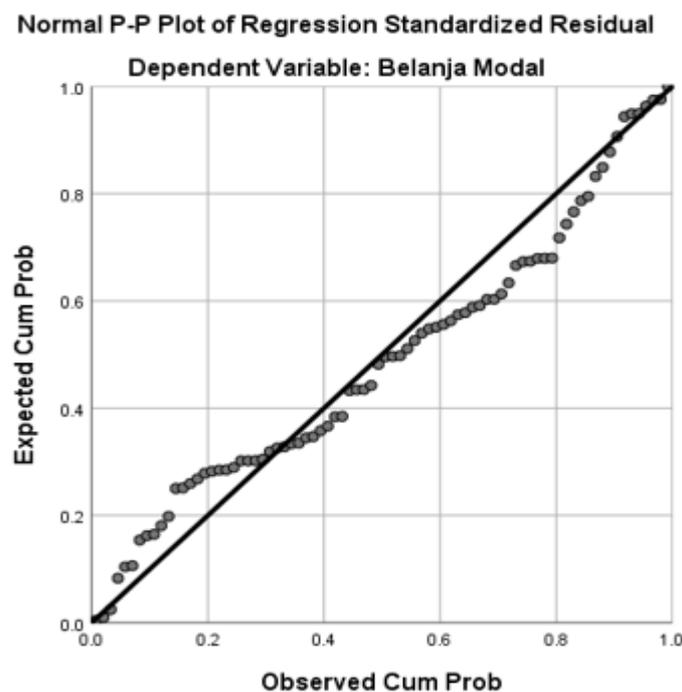
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)
 - Nilai minimum (terendah): 27.25 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020
 - Nilai maximum (tertinggi): 31.53 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.
 - Nilai mean (rata-rata): 29.1248
 - Standar deviasi: 1.13719
2. Variabel Dana Alokasi Khusus (X2)
 - Nilai minimum (terendah): 25.64 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.
 - Nilai maximum (tertinggi): 30.02 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021.
 - Nilai mean (rata-rata): 28.0944
 - Standar deviasi: 96984
3. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)
 - Nilai minimum (terendah): 24.09 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.
 - Nilai maximum (tertinggi): 29,91 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019.
 - Nilai mean (rata-rata): 27.1918.
 - Standar deviasi: 1.28718.
4. Variabel Belanja Modal (Y)
 - Nilai minimum (terendah): 26.51 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2021.
 - Nilai maximum (tertinggi): 30.08 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019.
 - Nilai mean (rata-rata): 27.8475
 - Standar deviasi: 73951

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam data penelitian sebelum dilakukan analisis linier berganda terhadap data tersebut. Uji yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas yang akan dijelaskan sebagai berikut.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan dengan metode grafik *P-P Plot of Regression standardize residual*.



Gambar 4. 5
Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot of Regression standardize residual.

Berdasarkan grafik *normal probability plot* gambar 4.5, terlihat bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini membentuk titik-titik yang menyebar di sekitar garis normal. Namun penting untuk di ingat bahwa uji

normalitas grafik tidak sepenuhnya akurat, dan secara statistik belum tentu menjamin normalitas data.

Oleh karena itu, dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan uji *one sample tes Kolmogorov Smirnov*. Uji ini digunakan untuk mendapatkan angka yang detail untuk menilai apakah persamaan regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji normalitas yang dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test
sebelum transformasi menjadi LN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0001190
	Std. Deviation	58502769842
		9.04400000
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.109
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Hasil pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test sebelum transformasi menjadi LN, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar *Asymp.Sig.(2-tailed) residual* dalam penelitian ini memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,009. Hal ini berarti bahwa data residual tidak berdistribusi normal sehingga untuk mengatasinya yaitu dengan cara data dapat ditransformasi. Menurut (Ghozali, 2021:38), data yang tidak berdistribusi secara normal dapat di transformasi agar menjadi normal. Transformasi data dilakukan melalui transformasi LN. Setelah transformasi menjadi LN, hasil uji normalitas dengan cara *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test
sesudah transformasi menjadi LN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33102052
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.066
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi yang baik tidak boleh terdapat korelasi antara setiap variabel independen (variabel bebas). Cara yang dapat dilakukan dalam mengindikasikan multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel *Collinearity Diagnostics*. Apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 ($>0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (<10), maka artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000		
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000	.243	4.121
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013	.323	3.099
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000	.472	2.120

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Tabel 4.4 diatas, dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel sebagai berikut.

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,243 atau lebih dari 0,10 ($> 0,10$) dan VIF sebesar 4,121 atau lebih kecil dari 10 (< 10), yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada variabel Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai tolerance sebesar 0,323 atau lebih dari 0,10 ($> 0,10$) dan VIF sebesar 3,099 atau lebih kecil dari 10 (< 10), yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada Dana Alokasi Khusus.
3. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai tolerance sebesar 0,472 atau lebih dari 0,10 ($> 0,10$) dan VIF sebesar 2,120 atau lebih kecil dari 10 (< 10), yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas ini, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas dan dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. Untuk model

regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan *Durbin Watson* untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak, kriteria dalam penilaian pengambilan keputusan berdasarkan uji *Durbin Watson* yaitu apabila $DU < D < 4-DU$, maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif dengan keputusan tidak ditolak. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.792	.33749	1.906
a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

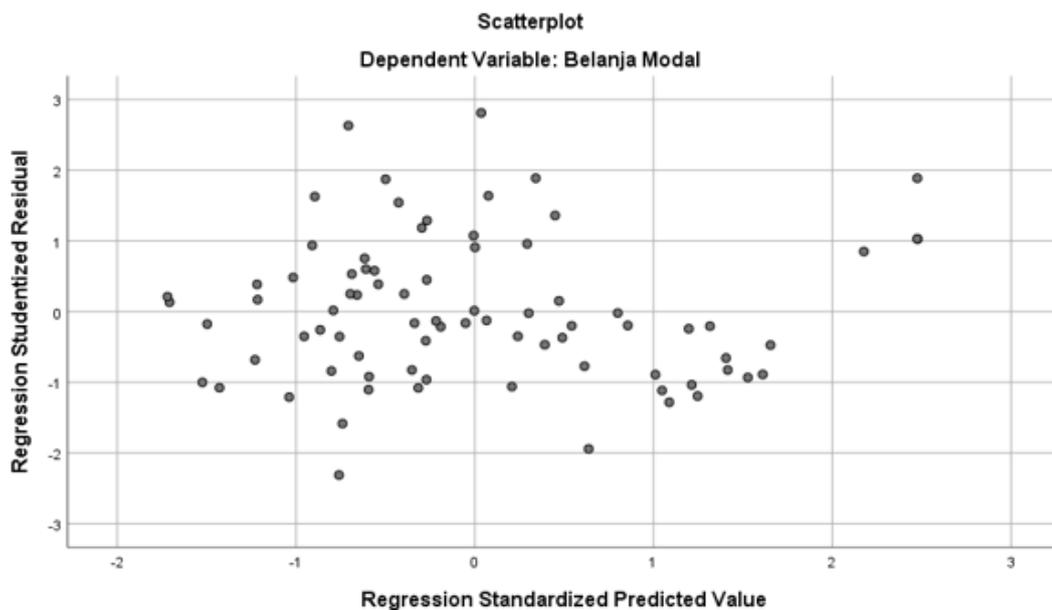
Hasil pengujian autokorelasi dengan *Durbin Watson*, menunjukkan nilai *Durbin Watson* (d) sebesar 1,906. Dalam penelitian ini banyaknya data yang digunakan (n) adalah 80 dengan jumlah variabel independen (k) adalah 3 dan tabel DW signifikansi 0,05. Sesuai dengan nilai yang ada pada tabel DW, maka nilai $DL = 1.5600$, $DU = 1.7153$ dan $4-DU = 2,2847$.

Syarat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jika tidak terjadi autokorelasi pada suatu penelitian ialah $DU < DW < 4-DU$, sehingga jika diterapkan dalam penelitian ini menghasilkan nilai $1.7153 < 1.906 < 2.2847$. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik tidak terdapat heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini penulis menggunakan *scatterplot*. Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Gambar 4. 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* diatas menunjukan bahwa tidak ada pola yang teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.4 Hasil Analisis Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel PAD, DAK, SILPA, terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Sumatera dan Jawa yang dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,381 + 0,515 X_1 - 0,175 X_2 + 0,198 X_3 + \epsilon$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 12,381 yang artinya menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai 0 maka belanja modal akan bernilai 12,381.
2. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 0,515. Artinya bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,515 atau 51,5% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus bernilai negatif sebesar -0,175. Artinya bahwa setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan pada belanja modal sebesar 0,175 atau 17,5% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai positif sebesar 0,198. Artinya bahwa setiap peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,198 atau 19,8% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.1.5 Analisis Uji Hipotesis

4.1.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.800	.792	.33749
a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Belanja Modal				

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Berdasarkan hasil output uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,792 atau sebesar 79,2%. Hal ini berarti bahwa 79,2% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 79,2%) atau 20,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.1.5.2 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pada dasarnya, uji statistik t digunakan untuk menentukan apakah variabel independent secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam uji t, terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis dapat diterima yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis juga dapat diterima. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data output IBM SPSS 26 diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikan dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan perhitungan diketahui titik persentase distribusi t (nilai t_{tabel}) dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $80-3-1=76$ pada $\alpha = 0.05$ adalah 1,9916. Hasil statistik t, yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki t_{hitung} sebesar 7,600. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($7,600 > 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki t_{hitung} sebesar -2,540. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($-2,540 < 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,013 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara langsung Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 4,607. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($4,607 > 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara

langsung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4.1.5.3 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara Bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam melakukan uji simultan memiliki ketentuan yang telah ditetapkan yaitu hipotesis dapat diterima apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan nilai df 1 (jumlah variabel -1) = (4-1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 80-3-1 = 76 (n merupakan jumlah data dan k merupakan jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,72. Dan jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil dari uji simultan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.547	3	11.516	101.104	.000 ^b
	Residual	8.656	76	.114		
	Total	43.203	79			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah						

Hasil dari tabel 4.9 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 101,104 dengan tingkat signifikansi 0,000, maka dapat dikatakan bahwa F_{hitung} sebesar 101,104 > F_{tabel} sebesar 2,72 (101,104 > 2,72), sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 7,600. Nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel (7,600 > 1,9916) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dimana ini menunjukkan bahwa 0,000 < 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel

pendapatan asli daerah berpengaruh Positif terhadap variabel belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 0,515. Artinya bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,515 atau 51,5% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Utami & Riharjo, 2021), (Arthadela & Mildawati, 2023) dan (Salamah et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat mengalokasikan pengeluaran yang dapat bermanfaat seperti menambah aset tetap daerah atau pembangunan infrastruktur daerah seperti sarana dan prasarana sebagai fasilitas kepada masyarakat atas partisipasi dalam membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan kesehatan dan lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Pramudya & Abdullah, 2021) yang menyatakan bahwa tingginya pendapatan asli daerah belum tentu diiringi dengan optimalisasi belanja modal, karena masih banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan pendapatan asli daerah untuk pemeliharaan rutin serta belum maksimal dalam menggali potensi penerimaan daerah. Penelitian (Leunupun & Heumasse, 2024) dan (Siregar, 2022) menyimpulkan bahwa rendahnya pendapatan asli daerah disebabkan kurangnya upaya pengembangan sumber-sumber penerimaan baru. Oleh karena itu, daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dengan menggali dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian ini menekankan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap dengan didukung oleh penelitian dari (Cahyani et al., 2024) yang mengatakan fasilitas yang memadai dapat memperkuat daya tarik suatu daerah dan menarik investasi di sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasokan air bersih.

Penelitian ini memiliki kelebihan mampu menjawab ketidakkonsistenan temuan dari studi sebelumnya. Penelitian (Arthadela & Mildawati, 2023) dan (Utami & Riharjo, 2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana kenaikannya memudahkan pemerintah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana melalui belanja modal. Namun, penelitian (Leunupun & Heumasse, 2024) dan (Siregar, 2022) menemukan bahwa pendapatan asli daerah rendah karena kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru, seharusnya setiap daerah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kelebihan utama penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dan berlandaskan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 6 tentang Otonomi Daerah, yang menegaskan hak daerah dalam mengelola kepentingan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar kapasitas daerah membiayai belanja modal.

Dampak dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Pane et al., 2021), (Utami & Riharjo, 2021) dan (Arthadela & Mildawati, 2023) mengungkapkan jika pendapatan asli daerah semakin besar pertumbuhannya maka belanja modal yang dilakukan pemerintah juga semakin baik dan mengarah pada investasi pembangunan infrastruktur publik yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini memiliki dampak bahwa peningkatan pendapatan asli daerah bukan hanya mencerminkan keberhasilan fiskal, tetapi juga kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer pusat, sekaligus memperkuat pernyataan bahwa kemandirian fiskal yang tercermin dari besarnya pendapatan asli daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan aset tetap yang dibutuhkan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang lebih luas, dengan mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di berbagai provinsi di Sumatera dan Jawa secara lebih menyeluruh dibandingkan studi sebelumnya yang terbatas pada satu wilayah.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t hitung untuk variabel dana alokasi khusus adalah sebesar -2,504. Nilai thitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t tabel ($-2,504 < 1,9916$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dimana ini menunjukkan bahwa $0,013 < 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap variabel belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus bernilai negatif sebesar -0,175. Artinya bahwa setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1% maka belanja modal akan menurun sebesar 0,175 atau 17,5% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, seperti penelitian (Santoso et al., 2021), (Febriyanti & Dewi, 2024) dan (Raniah et al., 2024) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak selalu mendorong peningkatan belanja modal. Hal ini dikarenakan, penggunaan dana alokasi khusus bersifat spesifik dengan aturan tegas dalam setiap mekanisme pemanfaatan daerah pada Kabupaten/Kota ataupun daerah memiliki penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan khusus yang diprioritaskan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Pramudya & Abdullah, 2021), (Safriyeni & Hidayat, 2024) dan (Nasution et al., 2022) mengatakan pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan untuk pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana melalui belanja modal. Dengan dana alokasi khusus, pemerintah daerah dapat menambah aset tetap jangka panjang dan mendorong alokasi dana transfer lainnya untuk belanja modal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dana alokasi khusus tidak semerta-merta meningkatkan belanja modal, karena alokasi dana yang bersifat spesifik dari pemerintah pusat membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah tidak sepenuhnya leluasa dalam mengalokasikan dana alokasi khusus ke dalam belanja modal strategis karena harus mengikuti ketentuan teknis dan prioritas nasional.

Penelitian ini memiliki kelebihan mampu menjawab ketidakkonsistenan temuan dari studi sebelumnya. Penelitian (Safriyeni & Hidayat, 2024) menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pembiayaan penting yang memperkuat pelaksanaan belanja modal dengan difokuskan pada investasi sarana dan prasarana fisik berumur panjang. Namun, penelitian dari (Febriyanti & Dewi, 2024) dan (Raniah et al., 2024) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak selalu mendorong peningkatan belanja modal secara proporsional. Hal ini disebabkan karena peran dana alokasi khusus sebagai *specific grant* juga mampu membatasi alokasi dana alokasi khusus pada belanja modal pemda karena alokasinya telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah yang termasuk kedalam prioritas nasional, sehingga pemda tidak dapat serta merta bebas mengalokasikan dana alokasi khusus kedalam belanja modal. Penelitian ini memperkuat temuan bahwa peningkatan dana alokasi khusus tidak selalu meningkatkan belanja modal, karena keberhasilannya lebih ditentukan oleh kemampuan daerah merancang program yang tepat sasaran, bukan sekadar besarnya dana yang diterima.

Dampak dari penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Kanaiya & Mustanda, 2020) memberikan dampak bahwa besar dana alokasi khusus sangat mempengaruhi dalam mendukung program nasional dan mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik. Penelitian (Lutpikah & Mahendra, 2020), (Siregar, 2022) dan (Santoso et al., 2021) menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus belum tentu meningkatkan belanja modal, karena pengelolaan yang kurang maksimal, perencanaan yang tidak optimal, serta aturan penggunaan yang ketat dan berbeda antar daerah. Hasil penelitian ini memiliki dampak bahwa peningkatan dana alokasi khusus tidak otomatis mendorong belanja modal strategis, karena penggunaannya terikat aturan pusat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas dana alokasi khusus lebih ditentukan oleh kemampuan daerah dalam merancang program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang lebih luas, dengan mengkaji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal di berbagai provinsi di Sumatera dan Jawa secara lebih menyeluruh dibandingkan studi sebelumnya yang terbatas pada satu wilayah.

4.2.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t hitung untuk variabel sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebesar 7,600. Nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel ($4,607 > 1,9916$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai positif sebesar 0,198. Artinya bahwa setiap peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,198 atau 19,8% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Chasanah & Handayani, (2025), (Silalahi et al., 2025), dan (Pika et al., 2021) menunjukkan bahwa semakin besar sisa lebih pembiayaan anggaran yang tersedia, semakin tinggi alokasi anggaran yang diarahkan untuk belanja modal, yang dapat digunakan untuk meningkatkan aset tetap dan infrastruktur daerah. Kondisi ini mencerminkan pemanfaatan dana yang tersisa secara produktif dapat meningkatkan aset tetap dan pembangunan infrastruktur daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Maula et al., 2023), (Nasution et al., 2022), dan (Salamah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan belanja modal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah daerah memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran untuk belanja yang bersifat jangka pendek seperti belanja pegawai, hibah, dan belanja tidak terduga, sehingga tidak berdampak langsung terhadap peningkatan aset tetap atau pembangunan infrastruktur. Sementara itu, penelitian ini menegaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki kontribusi dalam peningkatan belanja modal, di mana peningkatan nilai sisa lebih pembiayaan anggaran dapat memberikan kapasitas dana tambahan bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang bersifat jangka panjang dan produktif.

Penelitian ini memiliki kelebihan mampu menjawab ketidakkonsistenan temuan dari studi sebelumnya. Penelitian (Chasanah & Handayani, (2025), (Silalahi et al., 2025), dan (Pika et al., 2021) menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran turut mendorong peningkatan belanja modal, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan daerah. Namun, Penelitian dari (Maula et al., 2023), (Nasution et al., 2022), dan (Salamah et al., 2025) menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran belum efektif mendorong belanja modal karena lebih sering digunakan untuk belanja jangka pendek. Kelebihan utama penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang mengacu pada UU No 23 Tahun 2014, yang menegaskan otonomi daerah sebagai hak dan tanggung jawab dalam mengelola belanja, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran. Penelitian ini memperkuat temuan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berkontribusi terhadap belanja modal, karena semakin besar nilainya, semakin besar pula potensi pendanaan pembangunan jangka panjang.

Dampak dari penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Penelitian (Arthadela & Mildawati, 2023) dan (Maula et al., 2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran belum optimal untuk belanja modal strategis, karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin jangka pendek, sehingga mengurangi efektivitas pembangunan jangka panjang. Penelitian (Nurhuda, 2024) dan (Silalahi et al., 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien, ditandai dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran, dapat memperbesar kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja modal di tahun anggaran berikutnya. Hasil penelitian ini memiliki dampak bahwa peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan tanpa bergantung pada transfer pusat, serta berperan penting sebagai sumber pendanaan untuk mendukung belanja modal yang dibutuhkan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang lebih luas, dengan mengkaji kontribusi sisa lebih pembiayaan terhadap belanja modal di berbagai provinsi di Sumatera dan Jawa secara lebih menyeluruh dibandingkan studi sebelumnya yang terbatas pada satu wilayah.

4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 101,104, dengan tingkat signifikansi 0,000. F hitung menunjukkan nilai lebih besar dari pada F tabel ($101,104 > 2,72$), dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap belanja modal. dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan Anggaran ditunjukkan dari hasil penelitian nilai Adjusted R Square adalah 0,792 atau sebesar 79,2%. Hal ini berarti bahwa 79,2% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar ($100\% - 79,2\%$) atau 20,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian (Dharmawan et al., 2024), (Silalahi et al., 2025), dan (Sajidah et al., 2024) Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki peran penting dalam mendorong belanja modal daerah. Ketiga variabel tersebut mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan jangka panjang, Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah, efisiensi anggaran menjadi kunci utama peningkatan belanja modal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya seperti (Pika et al., 2021), (Arthadela & Mildawati, 2023), (Silalahi et al., 2025), dan (Sajidah et al., 2024) yang hanya berfokus pada satu daerah tentu atau provinsi tertentu, penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Sumatera dan Jawa serta mengkaji secara bersama-sama kontribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah dan bagaimana kapasitas fiskal dapat menentukan arah serta besaran belanja modal sebagai pendorong utama pembangunan daerah.

Kelebihan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian sebelumnya seperti (Pika et al., 2021), (Arthadela & Mildawati, 2023), (Silalahi et al., 2025), dan (Sajidah et al., 2024) lebih fokus pada pentingnya dana transfer dari pemerintah pusat atau salah satu sumber pembiayaan daerah secara terpisah, tanpa melihat keterkaitan dan peran gabungan dari seluruh sumber pendanaan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas dengan membuktikan secara empiris bahwa PAD, DAK, dan SILPA memiliki peran dalam menentukan besarnya belanja modal. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa belanja modal tidak hanya bergantung pada satu jenis pendanaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola semua potensi fiskal secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kekuatan keuangan daerah dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dampak dari penelitian terdahulu seperti (Dharmawan et al., 2024), (Silalahi et al., 2025), dan (Sajidah et al., 2024) memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memahami pentingnya alokasi anggaran yang tepat melalui belanja modal, serta menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berkontribusi dalam menentukan besarnya alokasi belanja modal. Penelitian ini memiliki dampak mendorong pemerintah daerah menyeimbangkan penerimaan dan belanja dengan mengoptimalkan PAD, memanfaatkan DAK secara strategis, dan mengarahkan SILPA pada belanja produktif. Dampak bagi peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan belanja melalui PAD, DAK, dan SILPA memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Bagi masyarakat, dampaknya dapat terlihat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efisien dan tepat sasaran. Bagi peneliti selanjutnya, temuan ini memperkuat studi sebelumnya dan membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai integrasi berbagai sumber penerimaan daerah sebagai strategi memperkuat kemandirian fiskal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Keunggulannya menunjukkan bahwa daerah dengan PAD tinggi memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar. Dampaknya yaitu mendorong peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
2. DAK tidak selalu berpengaruh karena alokasinya bersifat spesifik dan terikat aturan pusat. Keunggulannya terletak pada dukungannya terhadap program prioritas nasional. Dampaknya membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang pembangunan sesuai kebutuhan.
3. SILPA berpengaruh karena dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan tanpa bergantung pada transfer pusat. Keunggulannya mencerminkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dampaknya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja modal berkelanjutan.
4. Hasil dari keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh karena mencerminkan kapasitas fiskal dan transparansi pengelolaan anggaran. Keunggulannya mencerminkan integritas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dampaknya yaitu mendorong perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, menggali potensi yang ada pada daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat. Pemerintah diharapkan meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, khususnya dalam memanfaatkan dana alokasi khusus secara strategis dan tepat sasaran,

dengan tetap menyesuaikan program pembangunan pada kebutuhan lokal agar belanja modal lebih produktif dan berjangka panjang. Pemerintah juga diharapkan menggunakannya SILPA sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan belanja modal.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan topik menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi belanja modal, seperti indeks kapasitas fiskal.
3. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan literatur di bidang keuangan daerah, anggaran publik dan otonomi daerah. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pengelolaan fiskal yang efektif, khususnya dalam mengoptimalkan PAD, DAK, dan SILPA untuk mendukung belanja modal yang produktif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021*, 24, 687–692.
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–18.
- Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7437–7448.
- Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–8.
- Arthadela, M. N., & Mildawati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1–19.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. <https://e-ppid.bpk.go.id/> Diakses 6 Maret 2025
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Cahyani, A. D., Dewata, E., & Mayasari, R. (2024). The Influence of Regional Debt and Capital Expenditures on Financial Sustainability in Provincial Governments in Indonesia. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(3), 601–614. <https://doi.org/2688>
- Chasanah, F. M., & Handayani, N. (2025). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(1), 1–27.
- Dharmawan, N., Kusuma, I. C., & Mukmin, M. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kota Bogor, Bekasi dan Depok). *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2125–2139.
- Farhan, M. G., Sari, K. R., & Mubarak, M. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2358–2370.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Candra, Z., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian* (Cetakan Pe). CV. Pena Persada.
- Febriyanti, K. W., & Dewi, N. A. W. T. D. (2024). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(03), 735–746.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, R., & Masyitah, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Widya*, 5(1), 204–218.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Jurnal of Financial Economics*, 3(4), 1–78.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *Jurnal Manajemen*, 9(3), 1109–1128.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang *Klasifikasi Anggaran*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang *Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.
- Leunupun, E. G., & Heumasse, P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(1).
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Kranganyar Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.

- Maghfiroh, T., Warno, & Muheramtohad, S. (2024). The Impact of Regional Original Income and Balance Funds on local Government Financial Performance: an Islamic perspective in Central Java, Indonesia. *Jurnal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 6(1), 105–134.
- Maula, K. A., Alfiah, K. N., Mubarakah, I., Adawiyah, W. R., & Setyorini, C. T. (2023). Factors Affecting Capital Expenditure In Districts in West Java Province. *Accounting Analysis Journal*, 12(2), 134–143.
- Nasution, S. A. H. A., Zainal Arifin, K., & Choiruddin, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1637–1656.
- Nurhuda, N. (2024). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(3), 493–500.
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 212–225.
- Pika, Saiful, & Aprilia, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness*, 8(2), 125–140.
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad , dau , dak terhadap belanja modal. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 17(4), 653–660.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 48–75.
- Raniah, Siswadi, U., & Sofana, A. I. (2024). Pengaruh Dana Alokai Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. *Journal of Management Studies*, 11(3), 235–242.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 12–25.
- Ratmono, D., & Mahfud, S. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah : Berbasis Akrual* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Safriyeni, & Hidayat, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekobistek*, 13(4), 249–255.
- Sajidah, F. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2024). Pengaruh Pendaparan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SILPA Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi. *JSHI (Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner)*, 8(2), 57–65.
- Salamah, A. P., Maria, & Armaini, R. (2025). Determinan Belanja Modal Pada Provinsi Di Sumatera Dan Jawa. *Urnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 114–125.
- Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JIAP (Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila)*, 1(2), 94–105.
- Silalahi, S. M., Silaban, E. S., Sipahutar, I. M., Sitompul, R. S. M., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7918>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- Siregar, I. G. (2022). Pengaruh Dau, Dak, Pad Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175.
- Sudarsono, A., & Praptoyo, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal (Studi Pada 10 Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(11), 1–16.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2).

Alfabeta.

- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340–344.
- Utami, S. D. B., & Riharjo, I. B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 10(4), 1–19.
- Wisnuwardana, G. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilimu Dan Riset Akuntansi*, 12(10), 1–18.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id , Pos El : info@polsri.ac.id
	KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Kareena Priangka Putri
NIM : 062140512683
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Choiruddin, S.E., M.Si
NIP : 197011052003121003
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Pihak Pertama,



Kareena Priangka Putri
NIM 062140512683

Palembang, Maret 2025

Pihak Kedua,



Choiruddin, S.E., M.Si
NIP 197011052003121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001

Lampiran 2

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id , Pos El : info@polsri.ac.id
	KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Kareena Priangka Putri
NIM : 062140512683
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Okky Savira, S.E., M.Si., Ak
NIP : 199501042022032008
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Selasa pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Pihak Pertama,



Kareena Priangka Putri
NIM 062140512683

Palembang, Maret 2025

Pihak Kedua,



Okky Savira, S.E., M.Si., Ak.
NIP 199501042022032008

Mengetahui,
Ketua Jurusan

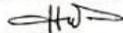
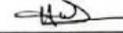
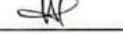
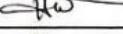
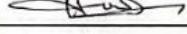
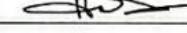
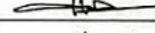
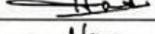
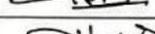
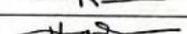


Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001

Lampiran 3

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id, Pos El : info@polsri.ac.id</p>
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kareena Priangka Putri
 NIM : 062140512683
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa
 Pembimbing II : Choiruddin, S.E., M.Si

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4-3-2025	Sosialisasi	
2.	6-3-2025	Konsultasi, Pengajuan Judul dan Revisi Judul	
3.	13-3-2025	Pengajuan Proposal dan Acc Judul	
4.	20-3-2025	Revisi bab 1, 2 dan 3	
5.	11-4-2025	Acc bab 1 dan bab 2, Revisi bab 3	
6.	17-4-2025	Acc siap untuk ujian proposal	
7.	28-5-2025	Pengajuan bab 1, 2 dan 3	
8.	13-6-2025	Revisi bab 1, 2 dan 3	
9.	16-6-2025	Acc bab 1, 2 dan 3	
10.	23-6-2025	Pengajuan bab 4 dan 5	
11.	3-7-2025	Revisi bab 4 dan 5	
12.	7-7-2025	Relasi manual u/ ujian komparatif	

Palembang, 2025
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP 197104121998022001

Catatan:

*) melingkari angka yang sesuai.

Ketua Jurusan/ Program Studi harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Skripsi sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.

Lembar pembimbingan Skripsi



Lampiran 4

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id , Pos El : info@polsri.ac.id
	LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kareena Priangka Putri
 NIM : 062140512683
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa
 Pembimbing II : Okky Savira, S.E., M.Si., Ak

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3-3-2025	konsultasi, Pengajuan Judul dan Revisi Judul	
2.	11-3-2025	Pengajuan Proposal dan Acc Judul	
3.	10-4-2025	Revisi bab 1,2 dan 3	
4.	15-4-2025	Acc bab 1,2 dan revisi bab 3	
5.	21-4-2025	Acc Proposal	
6.	3-6-2025	Pengajuan bab 1,2 dan 3	
7.	13-6-2025	Revisi bab 1,2 dan 3	
8.	20-6-2025	Acc bab 1,2 dan 3	
9.	26-6-2025	Pengajuan bab 4 dan 5	
10.	3-7-2025	Revisi bab 4 dan 5	
11.	6-7-2025	Acc bab 4 dan 5 dan Laporan Skripsi	
12.			

Palembang, 2025
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP 197104121998022001

Catatan:

*) melingkari angka yang sesuai.

Ketua Jurusan/ Program Studi harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Skripsi sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.

Lembar pembimbingan Skripsi ini harus dilampirkan dalam Skripsi.



Lampiran 5

Tabel Tabulasi Data Sebelum LN

Tahun	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Belanja Modal
2019	Aceh	2.698.912.471.144,15	1.744.873.155.047,00	2.954.457.964.943	3.162.088.165.983,04
	Sumatera Utara	5.761.270.412.051,31	4.205.592.917.360,00	981.167.561.436	1.249.600.483.637,40
	Sumatera Barat	2.328.432.873.686,19	1.844.831.704.011,00	501.905.482.963	1.062.230.453.034,52
	Riau	3.558.210.585.339,97	1.913.695.539.610,00	68.262.856.091	1.161.037.468.852,18
	Jambi	1.651.089.944.335,33	1.067.008.374.054,00	671.280.817.888	866.500.805.931,25
	Sumatera Selatan	3.494.510.853.251,62	2.259.489.236.940,00	680.516.254.017	1.606.219.507.432,26
	Bengkulu	826.674.936.049,87	148.677.988.196,00	213.318.214.221	741.823.063.584,34
	Lampung	3.018.067.291.159,88	581.870.716.694,00	93.876.882.791	1.014.037.524.021,39
	Kep.Bangka Belitung	826.701.095.322,07	491.156.874.143,00	302.270.663.670	441.201.203.550,86
	Kep. Riau	1.311.704.305.173,32	645.650.636.625,00	119.762.452.305	633.107.634.788,34
	Banten	7.022.309.916.623,81	2.489.732.034.076,00	1.079.956.142.888	1.379.319.818.260,58
	DKI Jakarta	45.707.400.004.802,00	2.796.003.496.994,00	9.755.082.722.776	11.551.927.779.590,00
	Jawa Barat	21.244.266.598.017,60	10.018.939.410.784,00	3.060.689.894.835	2.530.347.542.361,00
	Jawa Tengah	14.437.914.236.398,00	6.974.422.226.039,00	1.612.602.481.842	2.099.719.124.860,00
	DI Yogyakarta	2.082.795.334.434,50	978.540.310.453,00	471.794.246.869	1.035.203.185.484,85
	Jawa Timur	19.327.125.485.405,90	7.548.345.297.087,00	4.565.392.081.740	2.770.973.973.023,11
2020	Aceh	2.570.775.877.183,15	1.762.270.401.566,00	2.846.141.906.063,38	1.755.472.079.286,47
	Sumatera Utara	5.531.237.378.774,99	4.404.599.180.988,00	336.597.738.158,25	1.497.944.969.133,07

	Sumatera Barat	2.255.072.985.427,41	1.965.523.936.884,00	328.391.896.789,59	736.888.360.714,63
	Riau	3.333.176.032.497,57	2.000.906.541.174,00	81.216.115.134,47	919.245.593.570,52
	Jambi	1.535.183.487.238,34	1.116.093.491.331,00	420.323.429.670,45	642.695.707.788,37
	Sumatera Selatan	3.375.100.984.842,03	2.333.802.709.438,00	349.152.583.098,60	1.664.700.767.363,54
	Bengkulu	712.345.548.601,91	136.449.090.558,00	29.072.636.817,45	417.095.645.164,70
	Lampung	2.842.286.479.070,39	571.540.325.831,00	336.132.388.142,31	752.528.210.219,89
	Kep.Bangka Belitung	683.432.674.809,81	545.345.060.864,00	220.399.957.480,11	436.502.107.450,47
	Kep. Riau	1.195.637.693.103,26	723.205.571.644,00	405.366.252.062,57	586.608.798.242,52
	Banten	5.906.535.160.351,86	2.630.599.149.705,00	957.241.169.611,38	994.255.671.495,66
	DKI Jakarta	37.414.754.711.193,00	3.249.763.828.577,00	1.203.971.456.696,00	3.173.223.520.882,00
	Jawa Barat	18.521.882.178.042,00	10.853.697.316.005,00	3.289.300.908.323,16	1.672.906.514.876,00
	Jawa Tengah	13.668.282.278.855,00	7.333.796.931.752,00	1.119.157.446.700,00	996.994.505.160,00
	DI Yogyakarta	1.876.706.829.354,71	1.029.119.335.346,00	420.567.958.995,42	940.633.924.931,64
	Jawa Timur	17.950.996.508.801,00	7.635.260.684.379,00	4.369.342.489.882,39	1.904.556.949.359,00
2021	Aceh	2.505.887.909.031,12	1.720.322.392.030,00	3.969.617.354.782,29	2.199.333.370.928,94
	Sumatera Utara	6.402.714.086.506,57	4.256.865.102.322,00	499.350.054.431,19	1.141.203.699.701,86
	Sumatera Barat	2.551.899.163.309,89	1.952.740.325.159,00	260.850.624.206,07	666.352.120.893,35
	Riau	4.050.468.561.143,44	1.995.755.980.446,00	531.683.989.445,73	1.018.455.078.253,37
	Jambi	1.843.431.186.553,03	1.090.191.841.971,00	390.555.050.891,14	449.690.683.605,89
	Sumatera Selatan	3.865.463.033.085,17	2.257.907.336.131,00	121.619.545.350,36	1.836.834.114.021,94
	Bengkulu	984.420.164.399,73	750.374.550.023,00	102.542.595.053,29	324.342.084.410,29
	Lampung	3.249.669.847.265,05	2.232.553.876.742,00	190.917.079.139,04	849.692.114.832,21
	Kep.Bangka Belitung	895.763.128.991,25	516.892.969.333,00	49.536.738.602,62	428.654.245.651,53
	Kep. Riau	1.375.770.280.701,47	819.298.285.347,00	64.513.966.142,81	338.332.228.969,60

	Banten	7.010.370.228.687,00	2.607.131.404.985,00	681.415.905.380,42	1.297.233.609.176,00
	DKI Jakarta	41.606.307.405.630,00	3.233.462.889.927,00	5.165.696.290.359,00	6.865.827.016.719,00
	Jawa Barat	20.333.679.966.126,30	10.886.719.042.417,00	1.195.765.934.982,53	2.045.428.563.538,00
	Jawa Tengah	14.695.474.898.162,00	7.334.261.241.620,00	861.343.812.527,00	1.447.620.411.245,00
	DI Yogyakarta	1.900.923.074.881,46	1.079.416.445.404,00	484.453.213.139,49	654.839.728.747,39
	Jawa Timur	18.935.885.925.145,60	8.228.979.718.482,00	3.700.033.197.793,85	1.969.920.805.388,69
2022	Aceh	2.917.145.003.051,96	965.669.332.329,00	3.933.680.612.390,39	2.868.705.757.385,01
	Sumatera Utara	7.258.018.251.932,51	2.041.308.500.998,00	1.097.493.514.239,44	1.775.917.392.367,02
	Sumatera Barat	2.851.966.014.892,60	1.105.755.615.300,00	483.680.529.593,59	941.069.948.131,89
	Riau	4.696.769.079.910,70	956.328.413.490,00	983.967.097.721,62	1.508.534.414.100,59
	Jambi	2.163.585.918.787,36	607.951.512.607,00	727.979.765.896,76	906.797.776.480,80
	Sumatera Selatan	4.930.954.855.677,74	1.023.444.858.630,00	79.720.535.110,59	1.536.370.414.095,28
	Bengkulu	1.088.415.649.978,20	492.461.808.643,00	273.989.411.125,42	417.048.457.013,72
	Lampung	3.678.302.294.580,71	1.126.520.832.623,00	383.279.770.163,01	1.025.325.883.958,33
	Kep.Bangka Belitung	1.090.477.839.965,10	295.421.758.466,00	443.619.025.518,81	354.008.245.838,87
	Kep. Riau	1.675.729.889.079,95	414.172.072.280,00	170.514.470.170,73	552.161.762.368,05
	Banten	8.203.139.526.542,00	1.090.734.359.445,00	570.105.320.721,00	1.660.220.698.204,00
	DKI Jakarta	45.608.404.729.501,00	2.769.085.437.212,00	9.721.718.831.341,00	8.808.194.842.704,00
	Jawa Barat	23.249.622.253.957,00	4.731.465.673.851,00	2.575.016.379.798,92	2.419.138.025.661,00
	Jawa Tengah	16.264.618.853.852,00	3.385.111.274.502,00	1.435.692.884.754,00	1.713.641.630.081,00
	DI Yogyakarta	2.263.431.316.669,58	606.630.762.925,00	554.487.394.414,50	704.882.049.066,74
	Jawa Timur	21.256.651.207.715,70	3.993.371.787.432,00	4.079.381.410.799,00	2.505.994.499.065,62
2023	Aceh	2.987.188.692.203,88	1.107.806.353.811,00	1.304.678.718.450,03	1.676.030.003.504,35
	Sumatera Utara	7.225.688.105.702,51	2.148.915.361.360,00	1.076.160.606.520,79	2.629.552.763.164,36

Sumatera Barat	2.784.774.801.212,68	1.252.271.634.806,00	289.279.692.879,38	991.975.692.930,52
Riau	5.891.605.742.972,21	1.044.594.949.193,00	575.258.940.765,41	2.082.967.692.540,00
Jambi	2.095.649.226.537,57	747.311.122.521,00	631.461.501.413,26	1.039.534.897.827,94
Sumatera Selatan	5.199.841.748.586,80	1.159.212.591.658,00	322.917.042.473,19	1.239.943.154.568,99
Bengkulu	1.033.849.518.692,34	567.206.801.216,00	201.348.447.490,68	586.890.214.822,25
Lampung	3.766.194.060.533,03	1.109.218.409.720,00	292.676.339.039,78	1.207.289.357.586,99
Kep.Bangka Belitung	1.012.603.272.005,71	297.015.071.443,00	959.301.638.952,82	589.274.701.655,00
Kep. Riau	1.806.972.833.505,31	586.252.770.857,00	388.950.302.882,49	618.877.436.638,59
Banten	8.514.348.394.263,00	1.162.167.951.147,00	468.942.028.785,00	1.523.807.458.985,00
DKI Jakarta	49.139.745.715.234,00	3.052.311.346.362,00	8.600.096.664.254,00	8.857.260.068.298,00
Jawa Barat	24.375.389.630.532,00	4.957.076.641.184,00	2.335.392.104.049,00	2.523.831.913.631,00
Jawa Tengah	17.012.509.421.006,00	3.700.189.862.933,00	1.236.469.002.535,00	1.794.862.778.298,00
DI Yogyakarta	2.368.679.166.252,65	635.781.168.630,00	462.271.562.955,24	745.354.723.452,00
Jawa Timur	23.317.204.435.685,10	4.158.850.190.027,00	4.446.324.786.552,37	2.691.364.357.135,70

Lampiran 6

Tabel Tabulasi Data Sesudah LN

Tahun	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Belanja Modal
2019	Aceh	28,62	28,19	28,71	28,78
	Sumatera Utara	29,38	29,07	27,61	27,85
	Sumatera Barat	28,48	28,24	26,94	27,69
	Riau	28,90	28,28	24,95	27,78
	Jambi	28,13	27,70	27,23	27,49
	Sumatera Selatan	28,88	28,45	27,25	28,10
	Bengkulu	27,44	25,73	26,09	27,33
	Lampung	28,74	27,09	25,27	27,64
	Kep. Bangka Belitung	27,44	26,92	26,43	26,81
	Kep. Riau	27,90	27,19	25,51	27,17
	Banten	29,58	28,54	27,71	27,95
	DKI Jakarta	31,45	28,66	29,91	30,08
	Jawa Barat	30,69	29,94	28,75	28,56
	Jawa Tengah	30,30	29,57	28,11	28,37
	DI Yogyakarta	28,36	27,61	26,88	27,67
Jawa Timur	30,59	29,65	29,15	28,65	
2020	Aceh	28,58	28,20	28,68	28,19
	Sumatera Utara	29,34	29,11	26,54	28,04
	Sumatera Barat	28,44	28,31	26,52	27,33

	Riau	28,83	28,32	25,12	27,55
	Jambi	28,06	27,74	26,76	27,19
	Sumatera Selatan	28,85	28,48	26,58	28,14
	Bengkulu	27,29	25,64	24,09	26,76
	Lampung	28,68	27,07	26,54	27,35
	Kep.Bangka Belitung	27,25	27,02	26,12	26,80
	Kep. Riau	27,81	27,31	26,73	27,10
	Banten	29,41	28,60	27,59	27,63
	DKI Jakarta	31,25	28,81	27,82	28,79
	Jawa Barat	30,55	30,02	28,82	28,15
	Jawa Tengah	30,25	29,62	27,74	27,63
	DI Yogyakarta	28,26	27,66	26,76	27,57
	Jawa Timur	30,52	29,66	29,11	28,28
2021	Aceh	28,55	28,17	29,01	28,42
	Sumatera Utara	29,49	29,08	26,94	27,76
	Sumatera Barat	28,57	28,30	26,29	27,23
	Riau	29,03	28,32	27,00	27,65
	Jambi	28,24	27,72	26,69	26,83
	Sumatera Selatan	28,98	28,45	25,52	28,24
	Bengkulu	27,62	27,34	25,35	26,51
	Lampung	28,81	28,43	25,98	27,47
	Kep.Bangka Belitung	27,52	26,97	24,63	26,78
	Kep. Riau	27,95	27,43	24,89	26,55
Banten	29,58	28,59	27,25	27,89	

	DKI Jakarta	31,36	28,80	29,27	29,56
	Jawa Barat	30,64	30,02	27,81	28,35
	Jawa Tengah	30,32	29,62	27,48	28,00
	DI Yogyakarta	28,27	27,71	26,91	27,21
	Jawa Timur	30,57	29,74	28,94	28,31
2022	Aceh	28,70	27,60	29,00	28,68
	Sumatera Utara	29,61	28,34	27,72	28,21
	Sumatera Barat	28,68	27,73	26,90	27,57
	Riau	29,18	27,59	27,61	28,04
	Jambi	28,40	27,13	27,31	27,53
	Sumatera Selatan	29,23	27,65	25,10	28,06
	Bengkulu	27,72	26,92	26,34	26,76
	Lampung	28,93	27,75	26,67	27,66
	Kep.Bangka Belitung	27,72	26,41	26,82	26,59
	Kep. Riau	28,15	26,75	25,86	27,04
	Banten	29,74	27,72	27,07	28,14
	DKI Jakarta	31,45	28,65	29,91	29,81
	Jawa Barat	30,78	29,19	28,58	28,51
	Jawa Tengah	30,42	28,85	27,99	28,17
	DI Yogyakarta	28,45	27,13	27,04	27,28
	Jawa Timur	30,69	29,02	29,04	28,55
	2023	Aceh	28,73	27,73	27,90
Sumatera Utara		29,61	28,40	27,70	28,60
Sumatera Barat		28,66	27,86	26,39	27,62

Riau	29,40	27,67	27,08	28,36
Jambi	28,37	27,34	27,17	27,67
Sumatera Selatan	29,28	27,78	26,50	27,85
Bengkulu	27,66	27,06	26,03	27,10
Lampung	28,96	27,73	26,40	27,82
Kep.Bangka Belitung	27,64	26,42	27,59	27,10
Kep. Riau	28,22	27,10	26,69	27,15
Banten	29,77	27,78	26,87	28,05
DKI Jakarta	31,53	28,75	29,78	29,81
Jawa Barat	30,82	29,23	28,48	28,56
Jawa Tengah	30,46	28,94	27,84	28,22
DI Yogyakarta	28,49	27,18	26,86	27,34
Jawa Timur	30,78	29,06	29,12	28,62

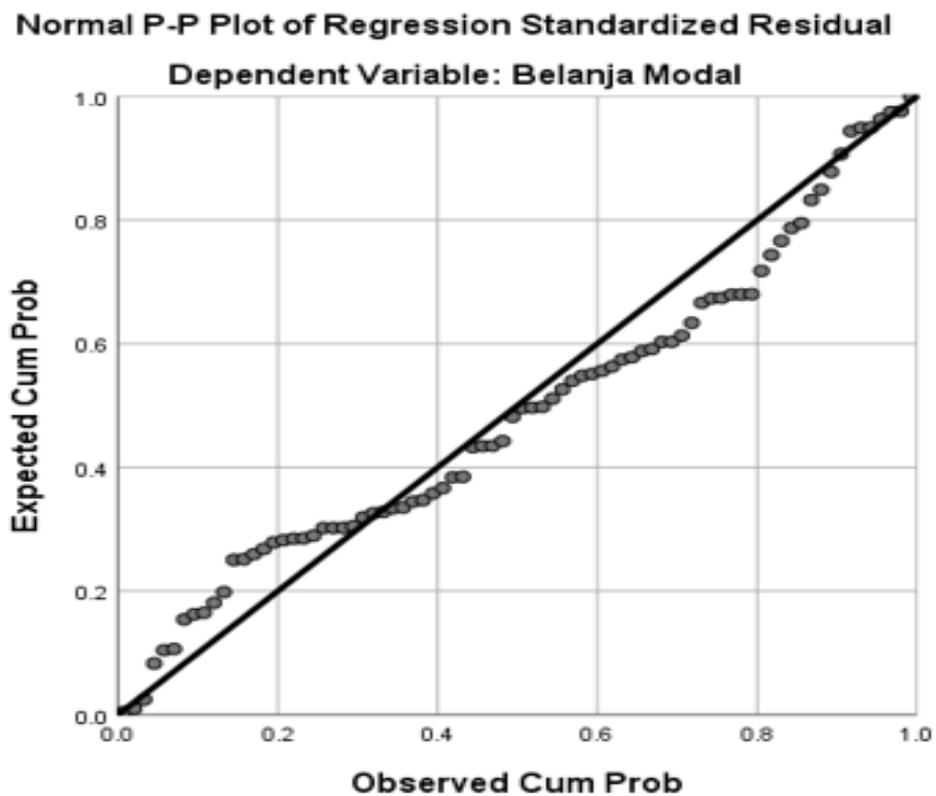
Lampiran 7

Hasil Output SPSS 26

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	80	27.25	31.53	29.1248	1.13719
Dana Alokasi Khusus	80	25.64	30.02	28.0944	.96984
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	80	24.09	29.91	27.1918	1.28718
Belanja Modal	80	26.51	30.08	27.8475	.73951
Valid N (listwise)	80				

Uji Normalitas dengan *P-P Of Regression Standardized Residual*



Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* Test sebelum transformasi menjadi LN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0001190
	Std. Deviation	585027698429.04400000
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.109
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* Test sesudah transformasi menjadi LN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33102052
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.066
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000		
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000	.243	4.121
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013	.323	3.099
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000	.472	2.120

a. Dependent Variable: Belanja Modal

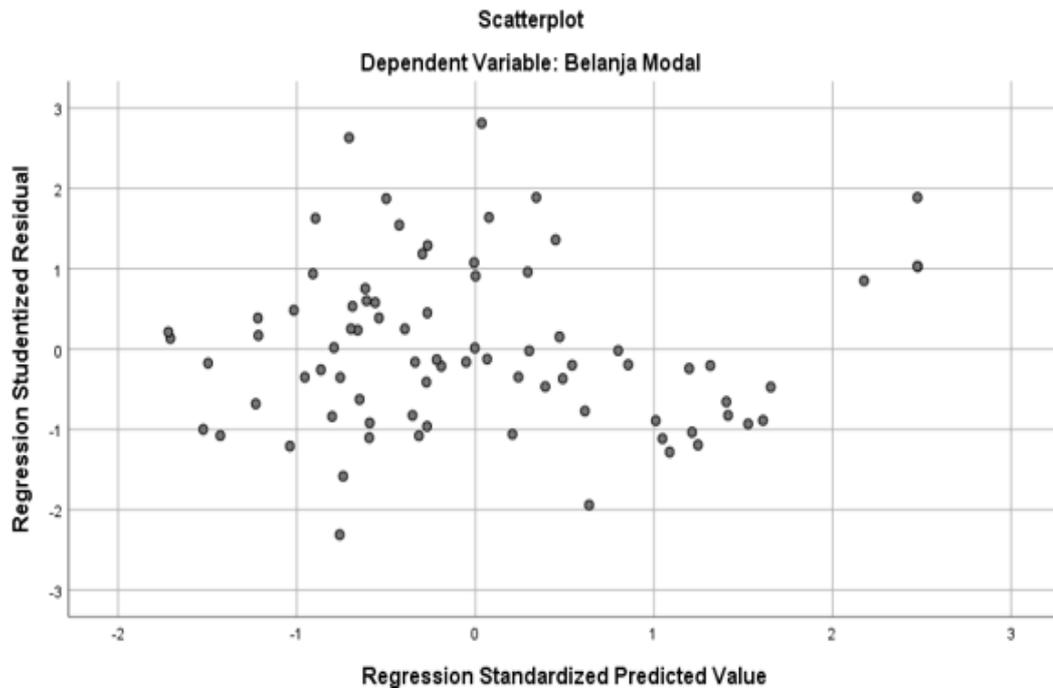
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.792	.33749	1.906

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.800	.792	.33749

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Statistik F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.547	3	11.516	101.104	.000 ^b
	Residual	8.656	76	.114		
	Total	43.203	79			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

Lampiran 8

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5$,

n	K=1		K=2		K=3		K=4		K=5	
	DL	DU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859

41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716

Lampiran 9

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 10

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20

21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89

47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81

71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79

